



**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (PRODAMAS) PLUS**
(Studi Deskriptif di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri)

*Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana pada
program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial*

SKRIPSI

Oleh

Angellia Nur Rahmayanti
200910301004

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
JEMBER
2024**



**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (PRODAMAS) PLUS**
(Studi Deskriptif di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri)

*Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana pada
program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial*

SKRIPSI

Oleh

Angellia Nur Rahmayanti
200910301004

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
JEMBER
2024**

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan baik dan lancar. Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Kepada orang tua tersayang, tercinta dan terkasih, Alm. Bapak Surahmad dan Almh. Ibu Mariati. Meskipun mereka tidak pernah memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi, tetapi motivasi, semangat serta doa mereka selalu mengiringi kesuksesan anak-anaknya. Alhamdulillah kini penulis sudah berada pada tahap ini, menyelesaikan karya tulis sederhana ini sebagai bentuk penghormatan terakhir sebelum kepulanganmu. Terimakasih sudah merawat, membesarkan hingga membimbing hingga titik ini, walaupun pada akhirnya penulis harus menghadapi tantangan sendiri.
2. Saudara kandung peneliti, Kakak Dewi dan Kakak Novita serta saudara ipar peneliti Kakak Suparto dan Kakak David yang telah memberikan motivasi dan dukungan, tidak kurangnya menjaga, merawat dan menggantikan posisi almarhum kedua orangtua.
3. Para guru TK-SMA dan dosen Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis sejak awal menginjak bangku sekolah hingga menyanggah gelar Sarjana Sosial.
4. Almamater Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember, terimakasih sudah memberikan pelajaran yang tidak akan terlupakan.

MOTTO

“Ketika belajar untuk menerima apa yang tidak bisa kita kendalikan akan membuka pintu untuk ketenangan dan kebijaksanaan. Terimalah apa yang ada, fokus pada hal yang bisa kita ubah dan biarkan yang lainnya mengalir dengan alami”

(Angellia Nur R)



PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Angellia Nur Rahmayanti

NIM : 200910301004

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis yang berjudul *“Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Plus “(Studi Deskriptif di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri)”* adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah disebutkan sumbernya, belum diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan aksanaan dari pihak manapun dan bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar

Jember, 16 Maret 2024

Yang Menyatakan

Angellia Nur Rahmayanti

NIM. 200910301004

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini berjudul *“Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Plus: Studi Deskriptif di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri”* telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 4 April 2024

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Pembimbing

Tanda Tangan

1. Pembimbing Utama

Nama : Dr. Kusuma Wulandari, S.Sos., M.Si

(.....)

NIP : 197706052003122002

2. Pembimbing Anggota

Nama : Wahyuni Mayangsari, S.Sos., M.Kesos

(.....)

NIP : 198802102019032017

Penguji

1. Penguji Utama

Nama : Drs. Syech Hariyono M.Si

(.....)

NIP : 195904151989021001

2. Penguji Anggota

Nama : Akhmad Munif Mubarak, S.Sos., M.Si

(.....)

NIP : 198712092024211001

ABSTRAK

Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Plus merupakan inisiatif Pemerintah Kota Kediri yang difokuskan pada pembangunan masyarakat ditingkat kelurahan, dengan basis wilayah RT. Salah satu kelurahan yang terlibat dalam program ini adalah kelurahan Kaliombo. Terdapat ketidaksesuaian dalam beberapa aspek, seperti pengelolaan potensi ekonomi seperti sentra kuliner, jasa dan UMKM yang belum efektif. Masalah juga timbul dalam pemangun infrastruktur terkait, seperti proyek pembangunan irigasi yang tidak tepat sasaran. Dibidang kepemudaan, tidak ada upaya untuk menyelenggarakan program pelatihan dan pembinaan karangtaruna. Selain itu, Kelurahan Kaliombo menjadi perhatian khusus karena masuk dalam kategori berkembang di Kota Kediri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan implementasi PRODAMAS Plus di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposif sampling*, dengan jumlah 4 informan utaman dan 4 informan tambahan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi non partisipasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Proses analisis data melibatkan pengumpulan data, reduksi data, display data dan dilanjutkan menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa impelementasi PRODAMAS Plus di Kelurahan Kaliombo memilik beberapa temuan, antara lain (1) Pelaksanaan program ini berjalan lancar, terutama pada pembangunan infrastruktur dan pengadaan barang sosial. (2) Partisipasi masyarakat masih kurang aktif, terutama dalam program pelatihan dan kepemudaan. (3) Model pemberdayaan yang diterapkan adalah Bottom-Up Planning, dimana perencanaan didasarkan pada kebutuhan masyarakat dengan peran pemerintah sebagai fasilitator. (4) Beberapa program PRODAMAS Plus ditolak oleh pemerintah Kelurahan Kaliombo karena dianggap formalitas. Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan agar dilakukan (1) Sosialisasi yang lebih intensif kepada seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman terhadap PRODAMAS Plus, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. (2) Pemanfaatan PRODAMAS Plus secara maksimal untuk memenuhi kebutuha masyarakat, sehingga pemberdayaan dapat berkelanjutan.

Kata kunci: Impelementasi, Prodamas Plus, Kebijakan

ABSTRACT

The Community Empowerment Program (PRODAMAS) Plus is an initiative of the Kediri City Government which is focused on community development at the sub-district level, based on the RT area. One of the sub-districts involved in this program is Kaliombo sub-district. There are discrepancies in several aspects, such as the ineffective management of economic potential such as culinary centers, services and MSMEs. Problems also arise in developing related infrastructure, such as irrigation development projects that are not on target. In the youth sector, there is no effort to organize youth training and development programs. This research aims to examine and describe the implementation of PRODAMAS Plus in Kaliombo Village, Kota District, Kediri City, using a descriptive qualitative approach. The research was carried out in Kaliombo Village, Kota District, Kediri City. Determining informants was carried out using a purposive sampling technique, with 4 main informants and 4 additional informants. Data collection was carried out through non-participatory observation, semi-structured interviews and documentation. The data analysis process involves data collection, data reduction, data display and continues using source triangulation techniques. The research results show that the implementation of PRODAMAS Plus in Kaliombo Village has several findings, including (1) The implementation of this program is running smoothly, especially in infrastructure development and the provision of social goods. (2) Community participation is still less active, especially in training and youth programs. (3) The empowerment model applied is Bottom-Up Planning, where planning is based on community needs with the government's role as facilitator. (4) Several PRODAMAS Plus programs were rejected by the Kaliombo Subdistrict government because they were considered formalities. Based on these findings, it is recommended that (1) more intensive outreach be carried out to all levels of society to increase understanding of PRODAMAS Plus, so that it can increase community participation. (2) Maximum use of PRODAMAS Plus to meet community needs, so that empowerment can be sustainable.

Keywords: Implementation, Prodamas Plus, Policy

RINGKASAN

Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Plus di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri; Angellia Nur Rahmayanti; 200910301004; halaman; Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Plus adalah suatu program Pemerintah Kota Kediri berfokus pada kegiatan pembangunan masyarakat di tingkat kelurahan yang berbasis di wilayah Rukun Tetangga (RT). Salah satu kelurahan di Kota Kediri yang melaksanakan PRODAMAS Plus adalah Kelurahan Kaliombo. Kelurahan Kaliombo telah bergabung dalam program Prodamas Plus sejak 2015, namun implementasinya belum optimal karena tidak sesuai dengan Pedoman Teknis dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 7 tahun 2022. Terdapat ketidaksesuaian dalam beberapa bidang, seperti ekonomi di mana potensi sentra kuliner, jasa, dan UMKM belum dimanfaatkan secara efektif. Masalah juga muncul dalam infrastruktur terkait proyek pembangunan saluran irigasi yang tidak tepat sasaran. Di bidang kepemudaan, tidak ada upaya untuk menyelenggarakan program pelatihan dan pembinaan karang taruna. Selain itu, Kelurahan Kaliombo menjadi perhatian lebih dalam menemukan potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mencukupi kebutuhan secara administratif. karena masuk dalam kategori berkembang di Kota Kediri.

Penelitian ini bertujuan mengkaji, mengetahui, dan mendeskripsikan implementasi program pemberdayaan masyarakat (Prodamas) Plus di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi terlaksananya penelitian ini di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan jumlah 4 informan pokok dan 4 informan tambahan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi non partisipasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Proses analisis data yang digunakan meliputi pengumpulan data, reduksi data, display data, dilanjutkan penyimpulan atau

verifikasi data. Perolehan data kemudian di uji dengan menggunakan teknik triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa dalam implementasi PRODAMAS PLUS di Kelurahan Kaliombo (1) Pelaksanaan Prodamas Plus di Kelurahan Kaliombo telah berjalan lancar, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan pengadaan barang sosial. (2) Partisipasi masyarakat dalam Prodamas Plus di Kelurahan Kaliombo masih kurang aktif, terutama dalam program pelatihan dan kepemudaan, disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau kesadaran masyarakat. (3) Model pemberdayaan yang diterapkan adalah pemberdayaan Bottom-Up Planning, dimana perencanaan didasarkan pada kebutuhan masyarakat dengan pemerintah berperan sebagai fasilitator. (4) Beberapa program Prodamas Plus ditolak oleh pemerintah Kelurahan Kaliombo karena dianggap formalitas tetapi tetapi mendukung dan melaksanakan program meskipun menambah beban kerja dan risiko bagi kelurahan.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Plus (Studi Deskriptif di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Dalam proses penulisan dan penyusunan skripsi penulis mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng. IPM, selaku Rektor Universitas Jember.
2. Dr. Djoko Poernomo, M.Si., CIQnR., CSBA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Dr. Mahfudz Sidiq, M.M selaku Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Prof. Dr. Drs. Hadi Prayitno, M.Kes selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa.
5. Dr. Kusuma Wulandari, S.Sos., M.Si dan Wahyuni Mayangsari, S.Sos., M.Kesos selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah mendidik selama di bangku perkuliahan.
7. Jajaran pegawai Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kediri, Bidang Pemerintahan Kota Kediri, Kelurahan Kaliombo yang sudah membantu memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan informasi yang dibutuhkan penulis.

8. Para informan yang telah membantu penulis dengan memberikan segala informasi, meluangkan waktu, dan juga memberikan kesempatan penulis untuk bersua sehingga terselesaikan skripsi ini.
9. Alm. Bapak Surahmad dan Almh. Ibu Mariati, sebagai orang tua penulis. Almarhum tetap kekal abadi di jiwa penulis, saya persembahkan gelar ini untuk mereka.
10. Kakak Dewi dan Kakak Novita, sebagai kakak kandung. Saya ucapkan terimakasih sudah menggantikan posisi almarhum orang tua.
11. Sahabat penulis di Kediri, Nadia Nurkholisa yang sudah memberikan *support*, menemani penulis dari senang sampai sedih, terimakasih atas segala bantuan.
12. Sahabat Jember, Anesty, Khofifah, Soleha, Nia, Wulan, Amanda, Tera, Milatul terima kasih atas dukungan, bertukar pikiran, membantu memberikan arahan yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi para pembaca

Jember, 16 Maret 2024

Angellia Nur Rahmayanti

200910301004

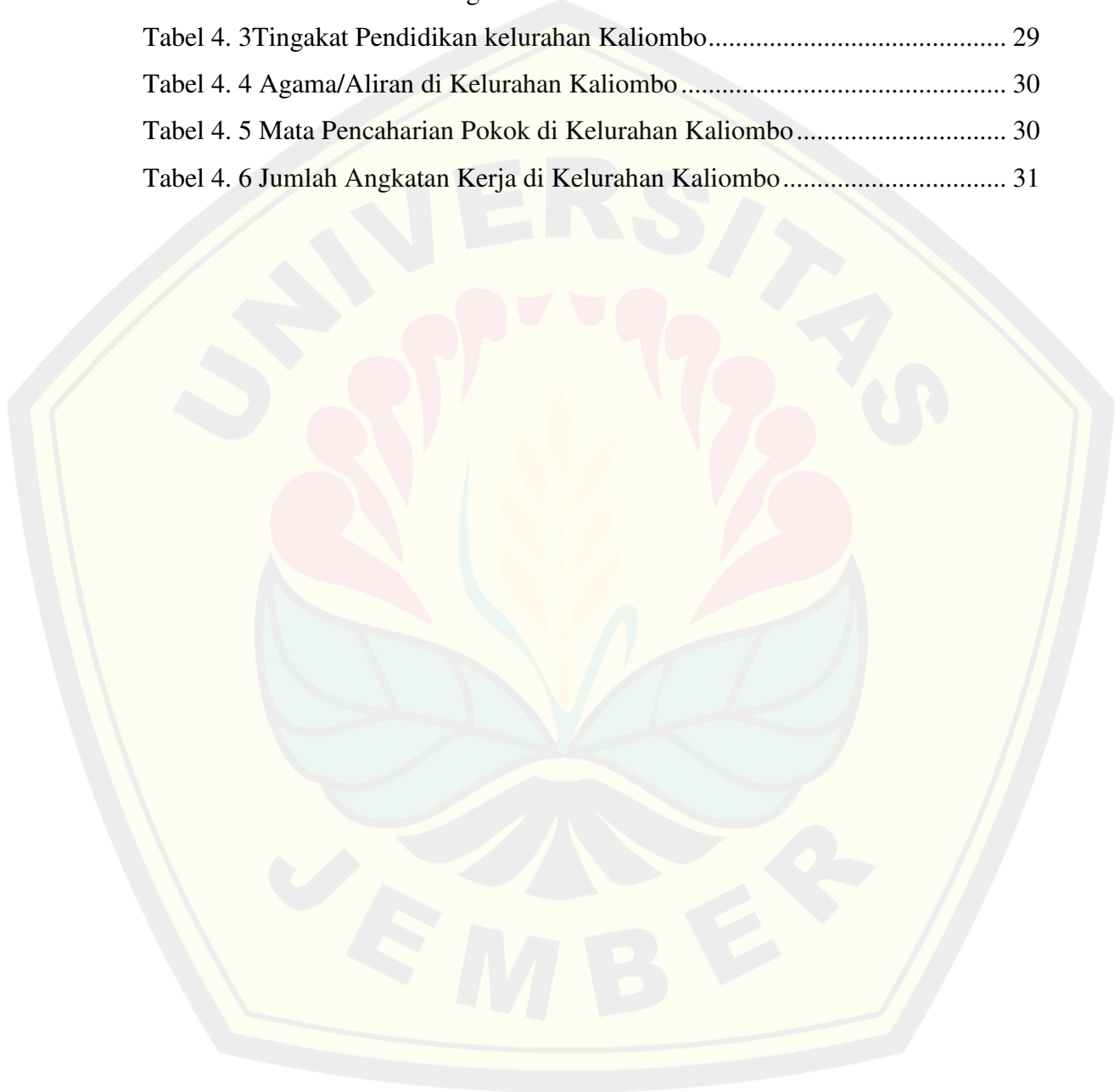
DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
ABSTRAK	vii
RINGKASAN	ix
PRAKATA	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR BAGAN.....	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB 2. TINJAUAN TEORI.....	5
2.1 Konsep Kebijakan Sosial	6
2.2 Konsep Implementasi Kebijakan	7
2.3 Konsep Pemberdayaan	10
2.4 Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Plus.....	13
2.5 Kesejahteraan Sosial.....	14
2.6 Penelitian Terdahulu	15
2.7 Kerangka Berpikir	17
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	19
3.1 Pendekatan Penelitian	19
3.2 Jenis Penelitian.....	19
3.3 Lokasi Penelitian	19
3.4 Teknik Penentuan Informasi	20
3.4.1. Informan Pokok.....	20
3.4.2. Informan Tambahan.....	21
3.5 Pengumpulan Data Penelitian	22
3.5.1. Observasi.....	22
3.5.2. Wawancara	24
3.5.3. Dokumentasi	24

3.6 Teknik Analisis Data	25
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	25
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	27
4.1 Hasil Penelitian	27
4.1.1. Gambaran Umum Kelurahan Kaliombo	27
4.1.2 Profil Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Plus di Kelurahan Kaliombo	31
4.2 Pembahasan.....	40
4.2.2 Implementasi Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Plus	40
4.2.3 Tahapan dan Model Pemberdayaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Plus	43
4.2.4 Faktor-faktor Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Plus di Kelurahan Kaliombo....	51
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN.....	58
5.1 Kesimpulan.....	58
5.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN.....	63

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Kondisi Iklim kelurahan Kaliombo.....	28
Tabel 4. 2 Jumlah Perkembangan Penduduk Kelurahan Kaliombo.....	28
Tabel 4. 3Tingkat Pendidikan kelurahan Kaliombo.....	29
Tabel 4. 4 Agama/Aliran di Kelurahan Kaliombo	30
Tabel 4. 5 Mata Pencaharian Pokok di Kelurahan Kaliombo.....	30
Tabel 4. 6 Jumlah Angkatan Kerja di Kelurahan Kaliombo.....	31



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Logo Prodamas.....	31
Gambar 4. 2 Monitoring di Kelurahan Kaliombo.....	48
Gambar 4. 3 Evaluasi Prodamas Plus di Kelurahan Kaliombo.....	41



DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Kerangka Berpikir..... 17



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program Pemberdayaan Masyarakat Plus yang selanjutnya disebut Prodamas Plus merupakan program andalan Walikota Kota Kediri dan menjadi contoh bagi pemerintah daerah lain dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam satu wilayah tertentu dalam mengembangkan potensi yang ada di tingkat lokal dan mengatasi permasalahan yang diutamakan, baik dengan menggunakan sumber daya internal maupun melalui kerjasama kolaboratif dengan berbagai pihak yang berbasis di wilayah RT, antar RT, dan kelurahan. Bantuan yang diberikan Prodamas Plus berbentuk infrastruktur, sosial budaya, ekonomi, kesehatan, pendidikan dan kepemudaan. Alokasi dana setiap RT yang diberikan pemerintah kota Kediri untuk pelaksanaan Prodamas Plus paling besar yaitu Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) per tahun. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Plus diatur dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat. Keberhasilan dari Prodamas Plus bergantung pada Partisipasi masyarakat dalam musyawarah untuk menyusun perencanaan pengembangan potensi masing- masing wilayah dan mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat.

Melalui Prodamas Plus, Pemerintah Kota Kediri secara aktif melakukan pembangunan di Kota Kediri melalui pemberdayaan masyarakat. Kota Kediri mendapatkan banyak penghargaan dari usahanya membangun wilayah. Salah satu pencapaian yang diraih oleh Kota Kediri pada *Smart City*, Kota Kediri berhasil meraih empat penghargaan sekaligus. Yakni, kategori Kota menuju cerdas, kategori *smart branding*, kategori Kota dengan ekonomi cerdas, dan kategori Kota dengan masyarakat cerdas (Pemkot Kediri, 2021). Selain itu, pencapaian lain yang didapatkan adalah Kota Kediri mencapai *Universal Health Coverage (UHC)* 97,72 persen. Penghargaan tersebut didapatkan karena di Kota Kediri lebih dari 95%

masyarakat telah didaftarkan BPJS oleh pemerintah daerah. (Pemkot Kediri, 2022)

Kelurahan Kaliombo telah menjadi peserta Prodamas Plus sejak tahun 2015, namun hingga saat ini Kelurahan Kaliombo belum berhasil menjalankan program Prodamas Plus secara maksimal. Adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan program dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 7 tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis pelaksanaan Prodamas Plus Tahun Anggaran 2023. Beberapa bentuk dari ketidak sesuaian program antara lain (1) Bidang ekonomi, mayoritas masyarakat Kelurahan Kaliombo memiliki sentra kuliner, jasa, UMKM jika potensi ini dimanfaatkan dengan baik melalui optimalisasi Prodamas Plus dapat meningkatkan perekonomian (3) Bidang infrastruktur, sejak awal adanya Prodamas Plus di Kelurahan Kaliombo menuai masalah yaitu terkait proyek pembangunan saluran irigasi yang tidak tepat sasaran (2) Bidang kepemudaan, tidak adanya upaya untuk menyelenggarakan program pelatihan dan pembinaan karang taruna.

Pada tahun 2023 dalam Sosialisasi Evaluasi Diri Perkembangan Kelurahan (EPKel) yang dilakukan oleh Bagian Pemerintahan Kota Kediri menentukan dua kategori, yaitu kategori kelurahan cepat berkembang dan Kelurahan berkembang. Kelurahan cepat berkembang berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraannya, yakni lebih baik dari Kelurahan berkembang. Kelurahan Kaliombo termasuk dalam kategori berkembang, dengan tiga indikator penilaian, yaitu indikator penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan. Hal ini menyebabkan Kelurahan Kaliombo menjadi perhatian lebih dalam menemukan potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mencukupi kebutuhan secara administratif (Pemkot Kediri, 2023).

Ketertarikan peneliti dalam penelitian ini karena pertama, Prodamas Plus merupakan salah satu usaha meningkatkan kesejahteraan sosial dalam bentuk intervensi kebijakan sosial yang menekankan pada pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Kediri memanfaatkan partisipasi masyarakat. Kedua, implementasi Prodamas Plus di Kelurahan Kota Kediri masih belum berhasil.

Secara teori, implementasi kebijakan adalah proses tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan.

Dari pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana pengimplementasian PRODAMAS PLUS di Kelurahan Kaliombo yang sampai saat ini belum mampu mewujudkan tujuan dari PRODAMAS PLUS yaitu pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kemandirian masyarakat yang merupakan bentuk usaha kesejahteraan sosial. Proses menuju kemandirian ini merupakan bentuk intervensi dalam pemberdayaan melalui implementasi kebijakan yang merupakan salah satu kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti “IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PRODAMAS) PLUS”

1.2 Rumusan Masalah

Pemerintah Kota Kediri melakukan intervensi pembangunan dan pemberdayaan dalam bentuk Prodamas Plus yang menjadi program lanjutan dari Prodamas. Prodamas Plus mendorong partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan di tingkat kelurahan yang berbasis di wilayah RT. Keberhasilan Prodamas Plus bergantung pada partisipasi masyarakat dalam musyawarah untuk menyusun perencanaan pengembangan masing-masing potensi wilayah dan mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. Meskipun dalam pelaksanaan terdapat dinamika yang perlu diperhatikan dalam mencapai keberhasilan dalam suatu program pemberdayaan. Kemudian mengacu pada pemaparan latar belakang sebelumnya, maka peneliti memfokuskan dan membatasi penelitian ini untuk mengupas, implementasi program pemberdayaan masyarakat (Prodamas) Plus yakni “Bagaimana Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) Plus?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai, yakni untuk mengkaji, mengetahui, dan mendeskripsikan implementasi program pemberdayaan masyarakat (Prodamas) Plus di Kelurahan Kaliombo Kecamatan Kota Kota Kediri,

sebagai penghambat intervensi pemerintah Kota Kediri dalam pembangunan dan pemberdayaan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan sosial.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan faedah yang didapat oleh pihak-pihak diluar penelitian, bisa jadi objek penelitian, instansi, dan masyarakat. Adanya penelitian ini tentu diharapkan dapat memberi kebermanfaatn bagi beberapa pihak, yaitu:

- 1) Berkontribusi dalam pengembangan Ilmu Kesejahteraan Sosial, paradigma pembangunan sosial yang berfokus pada implementasi kebijakan dalam pemberdayaan masyarakat.
- 2) Bagi pemerintah Kota Kediri selaku penyelenggara program mampu menjadi acuan untuk meningkatkan pemberdayaan
- 3) Bagi masyarakat Kelurahan Kaliombo selaku penerima manfaat program kebijakan, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Bagi peneliti, penelitian ini dapat menjadi sumber pembelajaran, pembuktian dan pengalaman dalam menggali informasi serta menyusun karya tulis ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat dengan berdasarkan sudut pandang Ilmu Kesejahteraan Sosial

BAB 2. TINJAUAN TEORI

Secara konsep, kebijakan sosial adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik. Kebijakan sosial merujuk pada keputusan yang diambil oleh pemerintah sebagai respon terhadap permasalahan yang memiliki dampak luas pada masyarakat, seperti penyelesaian masalah sosial atau pemenuhan kebutuhan masyarakat (Bessant, dkk, 2006:4, dalam Suharto, 2008). Kebijakan sosial disusun oleh pemerintah atau lembaga-lembaga pemerintah dengan tujuan menghadapi permasalahan sosial dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Sasaran dari kebijakan adalah menciptakan perubahan dalam masyarakat dengan menangani permasalahan sosial, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program.

Kebijakan sosial dan implementasi kebijakan saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Kebijakan tidak hanya tentang penyusunan dan pembuatan program, tetapi juga tentang pelaksanaan dan implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan adalah langkah yang diperlukan agar kebijakan dapat mencapai tujuan (Nugroho, 2003). Secara ringkas, implementasi kebijakan adalah proses tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Peningkatan kualitas hidup masyarakat mampu diwujudkan dengan membentuk kebijakan sosial dan mampu diimplementasikan secara optimal melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu tindakan sosial ketika penduduk dalam suatu komunitas bersatu untuk merencanakan dan melaksanakan tindakan bersama dengan tujuan menyelesaikan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial dengan memanfaatkan kemampuan dan sumber daya yang tersedia (Gunawan, 2009). Kegiatan pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup kelompok sasaran sehingga mereka menjadi lebih sejahtera dan memiliki kemampuan untuk memenuhi kehidupan pokok seta pada akhirnya mencapai suatu kemandirian. Kemandirian yang dimaksud masyarakat tidak hanya terbatas

pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup sosial, budaya, hak partisipasi dan hak politik masyarakat dalam menentukan nasibnya sendiri (Hamid, 2018).

2.1 Konsep Kebijakan Sosial

Kebijakan sosial adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik. Kebijakan sosial adalah ketetapan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga-lembaga pemerintah untuk merespon isu-isu yang bersifat publik dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat yang luas (Bessant, Watts, Dalton dan Smith 2006; dalam Suharto 2008). Kebijakan sosial sering kali berfokus pada aspek-aspek seperti kesejahteraan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perlindungan sosial, dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan sosial bertujuan untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat dengan cara mengurangi ketidaksetaraan, mengatasi masalah sosial, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Kebijakan semacam ini dapat mencakup program-program bantuan sosial, program pendidikan, program perumahan, dan berbagai inisiatif lain yang dirancang untuk memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan.

Kebijakan sosial merupakan alat atau mekanisme yang digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dalam masyarakat dengan tujuan memungkinkan masyarakat mencapai hasil yang diinginkan. Dalam kerangka ini, terdapat hubungan erat antara objektif dan tujuan masyarakat, yang dicapai melalui pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat. Secara esensial, kebijakan sosial menggambarkan usaha untuk mengatur hubungan antar kelompok dalam masyarakat yang bertujuan meningkatkan kualitas masyarakat (Jamrozik, 2011; dalam Adi, 2013)

Menurut Suharto (2006a; dalam Suharto 2008), sebagai kebijakan publik, kebijakan sosial memiliki fungsi *preventif* (pencegahan); *kuratif* (penyembuhan); *developmental* (pengembangan). Kebijakan sosial adalah ketetapan yang didesain secara kolektif untuk mencegah terjadinya masalah (fungsi *preventif*), mengatasi masalah (fungsi *kuratif*), dan mempromosikan kesejahteraan sosial (fungsi

developmental) sebagai wujud kewajiban negara (*state obligation*) dalam memenuhi hak-hak sosial warganya.

Kebijakan sosial dibuat oleh pemerintah atau lembaga-lembaga pemerintah untuk mengatasi masalah sosial dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas. Kebijakan bertujuan untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat dengan mengurangi ketidaksetaraan, mengatasi masalah sosial, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dilakukan melalui program, seperti kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Kediri yaitu Peraturan WaliKota Kediri Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat. Kemudian adanya perubahan peraturan pada tahun 2023 yaitu Peraturan WaliKota Kediri Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Plus Tahun anggaran 2023.

2.2 Konsep Implementasi Kebijakan

Menurut Nugroho (2003; dalam Abdal, 2015) implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Sejalan dengan pendapat Nugroho yaitu Suryaningrat (1988) mengemukakan implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan dengan mempergunakan sarana dan menurut urutan waktu tertentu. Pelaksanaan kebijakan dapat pula dirumuskan sebagai penggunaan sarana yang telah dipilih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu.

Menurut Abdal (2015) Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Proses implementasi kebijakan baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan telah ditetapkan, program-program telah dibuat dan dana telah dialokasikan untuk mencapai tujuan kebijakan. Suatu proses implementasi dapat digambarkan secara sistematis. Pengertian implementasi diatas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi

sebuah kebijakan dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah proses tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Ini melibatkan penyediaan sarana untuk melaksanakan kebijakan tersebut dan menciptakan dampak praktis pada masyarakat. Pentingnya melakukan evaluasi dan analisis yang matang sebelum mengimplementasikan kebijakan adalah untuk memastikan bahwa tujuan kebijakan dapat dicapai dengan tepat, tanpa kekurangan atau kelebihan yang dapat merugikan masyarakat. Dengan demikian, implementasi kebijakan harus selaras dengan kepentingan masyarakat dan mencegah kemungkinan terjadinya masalah yang tidak diinginkan.

Dalam pelaksanaan kebijakan terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasilnya. Faktor-faktor tersebut telah banyak dikemukakan oleh para ahli kebijakan, salah satunya yaitu model implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edward dalam Abdal (2015). Pendekatan teori ini terdapat empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

- a. Komunikasi, kesuksesan pelaksanaan kebijakan memerlukan pemahaman yang baik dari pihak yang akan melaksanakan tugas. Informasi mengenai tujuan dan sasaran dari kebijakan tersebut harus disampaikan dengan jelas kepada kelompok sasaran agar mengurangi kemungkinan terjadinya hambatan dalam implementasi.
- b. Sumberdaya, pelaksanaan yang efektif akan terhambat jika pelaksanaan kekurangan sumber daya yang dibutuhkan. Sumber daya ini bisa berupa sumberdaya manusia, serta sumberdaya finansial.
- c. Disposisi, disposisi merujuk pada sifat dan karakteristik yang dimiliki pelaksana, seperti komitmen, integritas, dan orientasi demokrasi.
- d. Struktur birokrasi, merujuk pada karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang berulang dalam badan eksekutif yang memiliki potensi dan keterkaitan yang penting dengan pelaksanaan kebijakan. Ini mencakup berbagai aspek seperti tata kerja, hierarki, dan dinamika hubungan antar bagian dalam badan tersebut yang dapat

mempengaruhi bagaimana kebijakan dijalankan dan diimplementasikan.

Terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan Prodamas Plus sesuai dengan Peraturan WaliKota Kediri Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Plus Tahun anggaran 2023, diantaranya:

1. Perencanaan

Perencanaan kegiatan Prodamas Plus dilakukan secara berjenjang. Perencanaan secara berkembang meliputi tahapan (1) Perencanaan tingkat kelurahan, perencanaan tingkat kelurahan meliputi: (a) Musyawarah kelurahan untuk menentukan permasalahan utama dan potensi kelurahan; (b) Pengusulan dari tingkat RT; (c) Sinkronisasi usulan perencanaan tingkat RT oleh Ketua RW yang bersangkutan. (2) Perencanaan tingkat kecamatan; (3) Perencanaan tingkat kota. Usulan perencanaan dilakukan secara berjenjang untuk penyelesaian permasalahan utama dan pengembangan potensi.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan didasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah disahkan. Pengadaan barang atau jasa dilaksanakan melibatkan Pokmas sebagai pelaksana swakelola.

3. Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh tim pengawas, pengawasan pelaksanaan dilakukan secara berkala sejak tahapan persiapan, pelaksanaan sampai dengan penyerahan hasil pekerjaan.

3. Pelaporan

Laporan hasil pelaksanaan Prodamas Plus disampaikan oleh Lurah kepada Walikota melalui Camat secara rutin setiap semester. Pelaporan hasil pelaksanaan Prodamas Plus oleh Lurah juga dilakukan melalui aplikasi Progresio di perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.

4. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi untuk pengendalian pelaksanaan Prodamas Plus di seluruh kelurahan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Tim Fasilitasi Prodamas Plus Kelurahan, Tim Koordinasi Prodamas Plus Kecamatan dan Tim Pengendali Prodamas Plus secara berkala.

2.3 Konsep Pemberdayaan

Menurut Mardikanto dan Soebianti (2012; dalam Hamid, 2018) menjelaskan bahwa pemberdayaan sebagai suatu rangkaian tindakan bertujuan untuk memperkuat dan mengoptimalkan kapabilitas kelompok yang kurang berdaya dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang menghadapi masalah kemiskinan. Konsep pemberdayaan sebagai sebuah proses mengacu pada kemampuan untuk berpartisipasi, memperoleh peluang dan mengakses sumber daya serta layanan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup, baik pada tingkat individu, kelompok, maupun masyarakat secara keseluruhan. Dalam pengertian ini, pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu proses yang direncanakan dengan tujuan meningkatkan manfaat atau efisiensi dari entitas yang sedang diberdayakan.

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu tindakan sosial ketika penduduk dalam suatu komunitas bersatu untuk merencanakan dan melaksanakan tindakan bersama dengan tujuan menyelesaikan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial dengan memanfaatkan kemampuan dan sumber daya yang tersedia (Gunawan, 2009; dalam Hamid, 2018)

Menurut Robert Chambers dalam Hamid (2018) pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang mencakup nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru dalam pembangunan yang menekankan aspek berpusat pada manusia (*people-centered*), partisipasi (*participatory*), memberdayakan (*empowering*) dan berkelanjutan (*sustainable*). Konsep ini lebih luas daripada sekedar memenuhi kebutuhan dasar atau menyediakan mekanisme untuk mencegah kemiskinan lebih lanjut (*safety net*). Sebaliknya, pemberdayaan diarahkan pada mencari alternative terhadap konsep

pertumbuhan ekonomi yang telah diterapkan sebelumnya dalam upaya pembangunan.

Menurut Hamid (2018) sebagai suatu proses berkelanjutan, kegiatan pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup kelompok sasaran sehingga mereka menjadi lebih sejahtera dan memiliki kemampuan untuk memenuhi kehidupan pokok seta pada akhirnya mencapai suatu kemandirian. Kemandirian yang dimaksud masyarakat tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup sosial, budaya, hak partisipasi dan hak politik masyarakat dalam menentukan nasibnya sendiri. Tujuan utama dari pemberdayaan adalah untuk memperkuat kekuasaan masyarakat, terutama kelompok yang secara alami kurang berdaya. Pemberdayaan dilakukan untuk memberikan alat, pengetahuan, dan dukungan yang diperlukan agar mereka dapat mengatasi keterbatasan menjadi lebih berdaya. Menurut Mardikanto dan Poerwoko (2012; dalam Hamid, 2018), tujuan pemberdayaan meliputi berbagai upaya perbaikan, yaitu:

1. Perbaikan Kelembagaan “*Better Instution*” Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, dapat memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.
2. Perbaikan Usaha “*Better Business*” Setelah kelembagaan mengalami perbaikan, maka diharapkan berimplikasi kepada adanya perbaikan bisnis dari lembaga tersebut.
3. Perbaikan Pendapatan “*Better Income*” Perbaikan bisnis diharapkan akan berimplikasi kepada peningkatan pendapatan atau income dari seluruh anggota lembaga tersebut.
4. Perbaikan Lingkungan “*Better Environment*” Lingkungan pada saat ini banyak mengalami kerusakan yang disebabkan oleh Jadi perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan “fisik dan sosial” karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan terbatas.
5. Perbaikan Kehidupan “*Better Living*” Tingkat kehidupan masyarakat dapat dilihat dari berbagai indikator atau berbagai faktor. Diantaranya

tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan atau daya beli masing-masing keluarga. Dengan pendapatan yang membaik, diharapkan ada korelasi dengan adanya lingkungan yang membaik.

6. Perbaiki Masyarakat “*Better Community*” Bila setiap keluarga mempunyai kehidupan yang baik, maka menghasilkan kehidupan kelompok masyarakat yang memiliki kehidupan yang lebih baik. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat dapat disimpulkan sebagai proses sukarela, partisipati, dan desentralisasi dalam memberi kepercayaan, kesempatan, serta tanggung jawab kepada masyarakat untuk mengelola permasalahan melalui penemuan potensi diri dan peningkatan kemampuan (*capacity building*) agar mampu mengatasi dan menindaklanjuti berbagai masalah yang dialami dengan tujuan melepaskan diri dari jerat kemiskinan ataupun keterbelakangan yang menimpanya.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat terdapat dua model pemberdayaan masyarakat diantaranya:

- a. Model pemberdayaan dari atas ke bawah (*top down*)
Menurut Soekanto (2012; dalam Hasanah,2020), model *top down* cenderung menggunakan logika berpikir dari ‘atas’ kemudian melakukan pemetaan ‘ke bawah’ untuk melihat keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan. Selain itu, pendekatan ini sering disebut sebagai pendekatan *policy centered*, artinya dalam model pemberdayaan melalui pendekatan *top down* sasaran pemberdayaan hanya menjadi objek dari yang akan menerima dan menikmati hasil.

Secara umum, kegiatan pemberdayaan dengan pendekatan *top down* dapat dibagi menjadi dua tahapan utama, yaitu perencanaan dan pelaksanaan. *Top down planning*, perencanaan dilakukan oleh pihak atasan dan ditunjukkan kepada bawahannya, dimana pengambilan keputusan dilakukan oleh atasan, sedangkan

bawahannya hanya bertindak sebagai pelaksana. Dalam konteks pemberdayaan, *top down planning* adalah proses perencanaan yang dilakukan oleh pihak pemberdayaan dan ditunjukkan kepada masyarakat, dimana peran masyarakat hanyalah sebagai pelaksana. Konsep *top down* kurang memperoleh partisipasi masyarakat, karena masyarakat tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

b. Model pemberdayaan dari bawah ke atas (*bottom up*)

Menurut Payne (dalam Hasanah,2020), model pendekatan *bottom up* adalah kegiatan pemberdayaan merupakan suatu pengkondisian dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pemberdayaan. Pendekatan ini tidak dimulai dari luar, melainkan dari dalam masyarakat itu sendiri. Model ini menempatkan masyarakat sebagai subjek. Pendekatan *bottom up* lebih memungkinkan penggalan dana masyarakat untuk pemberdayaan pembangunan. Hal ini disebabkan karena masyarakat lebih merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan pembangunan, yang notabene untuk kepentingan mereka sendiri.

Bottom up planning adalah perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan, dan permasalahan yang dihadapi oleh bawahan bersama-sama dengan atasan menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan dan atasan berfungsi sebagai fasilitator. Sedangkan dalam pengertian pemberdayaan, *bottom up planning* adalah perencanaan yang disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat sendiri dan pemberdayaan hanya sebagai fasilitator. *Bottom up* merupakan upaya melibatkan semua pihak sejak awal, sehingga setiap keputusan yang diambil dalam perencanaan adalah keputusan mereka bersama, serta mendorong keterlibatan dan komitmen sepenuhnya untuk melaksanakannya.

2.4 Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Plus

Program Pemberdayaan Masyarakat Plus yang selanjutnya disebut Prodama Plus adalah suatu program lanjutan dari Prodama untuk mendorong

partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan ditingkat kelurahan yang berbasis di wilayah Rukun Tetangga. Prodama Plus dilaksanakan dengan maksud untuk memberdayakan masyarakat melalui pengembangan partisipasi, keswadayaan, sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak sehingga terwujud kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Sasaran pelaksanaan Prodama Plus adalah seluruh RT yang terbentuk secara resmi dan/atau kelurahan di wilayah daerah.

Tujuan dilaksanakannya Prodama Plus adalah:

- a. Memfasilitasi masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan potensi di lingkungannya sehingga mampu merencanakan kegiatan berbasis pada karakteristik kebutuhan guna mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan;
- b. Memfasilitasi peningkatan kapasitas sumberdaya manusia melalui kegiatan dibidang pendidikan, kesehatan, sosial budaya dan kepemudaan;
- c. Memfasilitasi pengembangan potensi ekonomi lokal untuk penciptaan lapangan kerja, perluasan kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan sehingga mampu mewujudkan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung fasilitas lingkungan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan dan kepemudaan.

2.5 Kesejahteraan Sosial

Menurut Adi (2008) Kesejahteraan sosial dalam artian yang sangat luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. Taraf kehidupan yang lebih baik ini tidak hanya diukur secara ekonomi dan fisik belaka, tetapi juga ikut memperhatikan aspek sosial, mental, dan segi kehidupan spiritual. Istilah kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai kondisi sejahtera (konsepsi pertama), yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar

seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan. Pengertian seperti ini menempatkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan dari suatu kegiatan pembangunan. Misalnya, tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat. Kesejahteraan sosial dapat juga didefinisikan sebagai arena atau domain utama tempat berkiprah pekerjaan sosial. Sebagai analogi, kesehatan adalah arena tempat dokter berperan atau pendidikan adalah wilayah di mana guru melaksanakan tugas-tugas profesionalnya. Pemaknaan kesejahteraan sosial sebagai arena menempatkan kesejahteraan sosial sebagai sarana atau wahana atau alat untuk mencapai tujuan pembangunan (Suharto, 2004).

2.6 Penelitian Terdahulu

Peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi bahan kajian pada penulisan penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu:

Penelitian pertama dilakukan oleh Salma Syenita Fatimah,dkk yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Keberhasilan Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) di Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota Kota Kediri” pada tahun 2022, hasil dari penelitiannya ialah pelaksanaan Prodamas telah sesuai berdasarkan aturan Pemerintah Kota Kediri yang telah ditetapkan, dari tahap perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan telah berjalan baik dan efektif, walaupun pada tahun 2020 dan 2021 mengalami hambatan karena adanya pandemi. Selanjutnya, partisipasi masyarakat di Kelurahan Ngronggo Kota Kediri telah berjalan sangat baik. Hal ini dilihat dari banyaknya warga yang hadir ketika rapat sosialisasi. Bentuk-bentuk lain partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Prodamas di Kelurahan Ngronggo adalah partisipasi dalam pengambilan keputusan, Partisipasi dalam proses perencanaan dan kaitannya dengan program lain, Partisipasi dalam pelaksanaan.

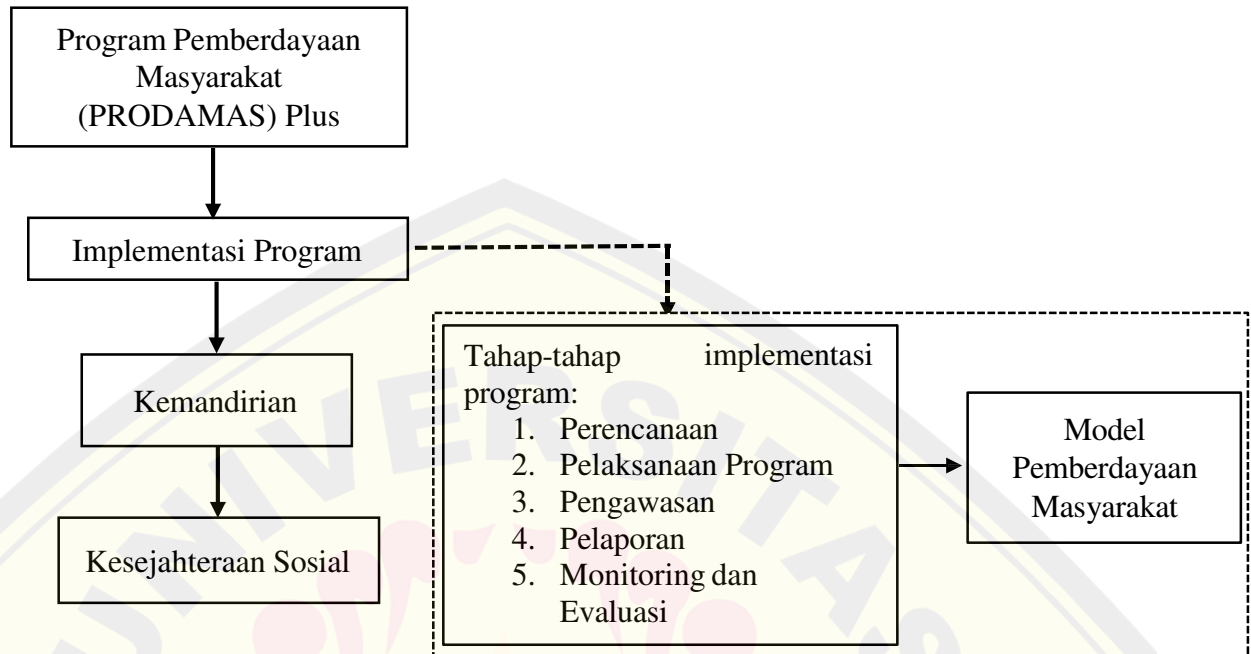
Penelitian kedua dilakukan oleh Alief Pinayungan yang berjudul “Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) Bantuan Dana 50 Juta Tiap Rt Di Kelurahan Jamsaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri ” pada tahun 2023, hasil dari penelitiannya ialah kegiatan yang dilaksanakan oleh

kelurahan Jamsaren dalam pelaksanaan PRODAMAS mencakup beberapa aspek, seperti sistem penganggaran, keterlibatan unsur SDM, sasaran dan perencanaan organisasi pelaksana, pengelolaan dana, pengadaan barang dan jasa, penyerahan hasil kerja, pembinaan, serta monitoring dan evaluasi. Selama penelitian mengidentifikasi beberapa perbaikan yang telah dilakukan dan juga yang dihadapi dalam pelaksanaan PRODAMAS di Kelurahan Jamsaren.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Gebriel Irene Yulistya yang berjudul “Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) Plus Pada Bidang Ekonomi Di Kelurahan Bangsal Kota Kediri (Studi Pada Koperasi Sehat Sejahtera Erwe 2 Bangsal) “ pada tahun 2023, hasil dari penelitiannya adalah Pelaksanaan kegiatan Prodamas Plus dalam bidang ekonomi di Kelurahan Bangsal, Kota Kediri, menunjukkan kurangnya minat dan respons masyarakat terhadap program yang ditawarkan melalui Peraturan Walikota. Hasil penelitian menunjukkan adanya kerjasama antara berbagai pihak, termasuk Pemerintah Kota Kediri, Kelurahan Bangsal, Ketua RW, Ketua RT, serta pengurus dan anggota koperasi dalam pengembangan ekonomi melalui Koperasi Sehat Sehat Sejahtera RW 2 Bangsal. Penelitian juga menunjukkan bahwa Prodamas Plus memberikan dampak positif kepada anggota koperasi, mengindikasikan potensi dari program tersebut dalam meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

Ketiga penelitian diatas, tidak dirinci secara jelas mengenai alur implementasi program PRODAMAS Plus. Penelitian tersebut hanya menjelaskan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan PRODAMAS Plus. Selain itu, pembeda antara tiga penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu tempat penelitian, waktu penelitian, pembahasan dan proses penelitian. Namun, penelitian terdahulu dijadikan sebagai kajian penelitian ini.

2.7 Kerangka Berpikir



Bagan 2. 1 Kerangka Berpikir

Program pemberdayaan masyarakat yang selanjutnya disebut Prodamas Plus merupakan program pemberdayaan masyarakat yang berlaku di Kota Kediri. Tujuan program ini adalah untuk mengembangkan potensi yang ada di tingkat lokal dan mengatasi permasalahan yang diutamakan, baik dengan menggunakan sumber daya internal maupun melalui kerjasama kolaboratif dengan berbagai pihak yang berbasis di wilayah RT, antar RT, dan kelurahan. Bantuan yang diberikan Prodamas Plus berbentuk infrastruktur, sosial budaya, ekonomi, kesehatan, pendidikan dan kepemudaan.

Kebijakan sosial dan implementasi merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan karena sebuah kebijakan tidak hanya terbatas pada perumusan dalam bentuk peraturan, tetapi juga memerlukan pelaksanaan atau implementasi untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini, implementasi berperan penting dalam mencapai tujuan dari Prodamas Plus yang terbentuk untuk mengembangkan potensi yang ada di tingkat lokal dan mengatasi permasalahan. Dengan kata lain, implementasi

merupakan langkah tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Prodamas Plus adalah suatu program yang menekankan pada pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pemberdayaan dalam Prodamas Plus diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memiliki kemampuan untuk memenuhi kehidupan pokok serta pada akhirnya mencapai suatu kemandirian. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat dalam Prodamas Plus sebagai proses sukarela, partisipasi dalam memberi kepercayaan, kesempatan, serta tanggung jawab kepada masyarakat untuk mengelola permasalahan melalui penemuan potensi diri dan meningkatkan kemampuan dalam mengatasi dan menindaklanjuti berbagai masalah yang dialami.

Prodamas Plus bertujuan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat dengan memperhatikan berbagai bidang seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan dan budaya. Mencerminkan pendekatan yang lebih holistik dalam mencapai kesejahteraan, tidak hanya fokus pada kebutuhan mendasar seperti makanan dan tempat tinggal, tetapi juga aspek-aspek sosial, budaya yang penting bagi kesejahteraan secara keseluruhan. Dengan demikian, Prodamas Plus menjadi implementasi dari konsep kesejahteraan sosial yang mengakui kompleksitas kehidupan manusia dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh.

Penelitian ini peneliti akan melihat bagaimana implementasi pada pelaksanaan Prodamas Plus di Kelurahan Kaliombo. Terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan Prodamas Plus sesuai dengan Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Plus Tahun anggaran 2023, diantaranya Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi.

Selain implementasi dari Prodamas Plus, penelitian ini akan melihat model pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam implementasi Prodamas Plus. Secara konsep, terdapat dua jenis pemberdayaan masyarakat yaitu *top down* dan *bottom up*.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memilih metode kualitatif karena bertujuan menggali dan menjelaskan secara rinci fenomena yang sedang diteliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) Plus di Kelurahan Kaliombo, Kota Kediri. Pendekatan kualitatif memungkinkan penelitian ini untuk menggali data yang lebih komprehensif dan menggambarkan dengan baik situasi, kondisi partisipasi masyarakat melalui penelitian lapangan.

3.2 Jenis Penelitian

Berisi informasi populasi target dan sampel yang digunakan dalam penelitian. Jenis penelitian yang dipilih dalam studi ini adalah kualitatif deskriptif. Pemilihan pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Plus di Kelurahan Kaliombo, Kota Kediri. Penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana pengimplementasian PRODAMAS Plus. Oleh karena itu, metode kualitatif deskriptif sesuai untuk menggambarkan berbagai sumber data dan informasi, termasuk pandangan berbagai pihak dan hasil dari observasi serta wawancara yang menjadi data utama dalam penelitian ini. Data yang diperoleh disajikan dan diinterpretasikan sesuai dengan realitas di lapangan tanpa melakukan konversi menjadi angka atau simbol, melainkan hanya berusaha untuk mencerminkan kondisi lapangan.

3.3 Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian menggunakan teknik *purposive area*, dalam menentukan lokasi dilakukan secara sengaja dengan pertimbangan Pertama, Kelurahan Kaliombo mengikuti Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Plus sejak Program ditetapkan. Kedua, Kedua, implementasi Prodamas Plus di Kelurahan Kota Kediri masih belum berhasil. Fenomena

tersebut kelurahan Kaliombo menjadi lokasi strategis untuk dilakukan pengkajian implementasi program secara lebih kompleks.

3.4 Teknik Penentuan Informasi

Dalam penelitian ini, penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Terdapat dua jenis informan yang digunakan dalam penelitian ini, yakni informan pokok (*primary informan*) dan informan tambahan (*secondary informan*).

3.4.1. Informan Pokok

Informan pokok yang dipilih sesuai dengan pertimbangan dan kriteria yang sudah ditentukan oleh peneliti dalam penelitian ini, antara lain:

1. Kepala bagian (KABAG) Pemerintahan, Pemerintah Kota Kediri, Bagian Pemerintahan mempunyai tupoksi membantu bagian asisten pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat dalam mengembangkan program salag satunya PRODAMAS Plus. Kepala bagian mempunyai tanggung jawab penuh terlibat dalam Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Plus.
2. Kepala Kelurahan Kaliombo. Kepala kelurahan Kaliombo mempunyai peran penting dalam pelaksanaan PRODAMAS Plus dikarenakan mempunyai kedudukan tinggi di kelurahan Kaliombo.
3. Tim Pelaksana Kelurahan. Tim pelaksana PRODAMAS Plus memiliki tugas melaksanakan sosialisasi tentang pelaksanaan PRODAMAS Plus, memfasilitasi pelaksanaan PRODAMAS Plus, mengkoordinasikan pelaksanaan PRODAMAS Plus, pengendalian dan pemantauan pelaksanaan PRODAMAS Plus, memberikan saran serta masukan terhadap pelaksanaan

Informan pokok yang dipilih sesuai dengan pertimbangan dan kriteria yang sudah ditentukan oleh peneliti dalam penelitian ini, antara lain:

1. Informan HR adalah kepala kelurahan Kaliombo. Kepala kelurahan Kaliombo mempunyai peran penting dalam pelaksanaan Prodamas Plus dikarenakan mempunyai kedudukan tinggi di Kelurahan

Kaliombo;

2. AT merupakan Kepala Bagian (KABAG) Pemerintahan, Pemerintah Kota Kediri. Bagian Pemerintahan mempunyai tupoksi membantu bagian asisten pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat dalam mengembangkan program salah satunya Prodamas Plus. Kepala bagian terlibat langsung dan bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Plus;
3. Informan RB merupakan koordinator Prodamas Plus di Kelurahan Kaliombo, mempunyai tanggung jawab penuh dalam melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Plus di Kelurahan Kaliombo;
4. Informan DF merupakan kelompok masyarakat (POKMAS) di Kelurahan Kaliombo. Dalam Perwali no 32 tahun 21 terkait pedoman teknis PRODAMAS Plus dijelaskan bahwa kelompok masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah kelurahan sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Plus. POKMAS berpengaruh dalam pelaksanaan PRODAMAS Plus di Kelurahan Kaliombo karena POKMAS mengawal jalannya PRODAMAS Plus dari perencanaan sampai evaluasi.

3.4.2. Informan Tambahan

Informan tambahan yang dipilih sesuai dengan pertimbangan peneliti, antara lain:

1. Ketua RT. Pemilihan ketua RT sebagai informan tambahan dalam penelitian ini dikarenakan sasaran pelaksanaan dari Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Plus
2. Masyarakat. Masyarakat sebagai penerima manfaat dari Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Plus di Kelurahan Kaliombo.

Informan tambahan yang dipilih sesuai dengan pertimbangan peneliti, antara lain:

1. Informan TS merupakan ketua RT 06, Kelurahan Kaliombo. Pemilihan informan TS dalam penelitian dikarenakan selain menjadi ketua RT TS menjadi bagian dari kelompok masyarakat (Pokmas) yang terlibat dalam pelaksanaan PRODAMAS Plus.
2. Informan DNS merupakan ketua RT 03, Kelurahan Kaliombo. Pemilihan informan DNS dalam penelitian dikarenakan selain menjadi ketua RT DNS menjadi bagian dari kelompok masyarakat (Pokmas) yang terlibat dalam pelaksanaan PRODAMAS Plus.
3. Informan TAA merupakan ketua RT 05, Kelurahan Kaliombo. Pemilihan informan TAA dalam penelitian dikarenakan selain menjadi ketua RT TAA menjadi bagian dari kelompok masyarakat (Pokmas) yang terlibat dalam pelaksanaan PRODAMAS Plus.
4. Informan DR merupakan warga, Kelurahan Kaliombo. Pemilihan informan DR dalam penelitian dikarenakan DR memiliki UMKM yang belum berdasarkan dampak dari PRODAMAS Plus yang berfokus pada perekonomian yakni kelompok usaha bersama (KUBE)

3.5 Pengumpulan Data Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga metode digunakan untuk mengumpulkan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan dari penggunaan metode-metode ini adalah untuk memperdalam pemahaman peneliti terhadap fenomena yang akan diteliti.

3.5.1. Observasi

Observasi adalah langkah awal dari proses pengumpulan data yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan melakukan pengamatan secara langsung kondisi lapangan dengan tujuan memahami situasi, latar belakang, dan kondisi fenomena atau fokus penelitian. Dalam penelitian ini, observasi digunakan untuk mengamati dan mengetahui bentuk, suasana, dan lingkungan dari fenomena yang

diteliti yakni program pemberdayaan masyarakat (PRODAMAS) Plus dan pengimplementasian program.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi *non-participant*, peneliti tidak terlibat dalam kegiatan pengimplementasian PRODAMAS Plus dan dilakukan secara tidak langsung atau hanya sekedar pengamat luar dan tidak terikat pada kewajiban untuk mengikuti proses tersebut. Observasi ini secara langsung mengamati proses implementasi, mengidentifikasi kendala- kendala yang muncul selama pelaksanaan serta model pemberdayaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Plus di kelurahan Kaliombo. Pada saat melakukan observasi ini, peneliti mendapatkan informasi-informasi terkait data-data yang peneliti kumpulkan untuk mengecek antara realitas dengan jawaban informan. Sebelumnya, saat observasi peneliti memiliki serangkaian langkah yang harus dilakukan sebagai berikut:

a. Memastikan lokasi penelitian

Pada langkah ini, peneliti memastikan lokasi penelitian dengan menjalankan berbagai perizinan yang diperlukan untuk memperoleh akses pada tempat penelitian. Perizinan yang dilakukan oleh peneliti yakni pemenuhan syarat administrasi melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS) Kota Kediri untuk mendapatkan surat perizinan melakukan penelitian di Pemerintah Kota Kediri dan Kelurahan Kaliombo.

b. Mengidentifikasi “bagaimana” dan “siapa” yang hendak diteliti, dan untuk berapa lama observasi dilakukan. Pada tahap ini, peneliti ingin mengetahui terkait proses implementasi dan informan yang telah ditentukan peneliti dalam menjalankan penelitian.

c. Menentukan peran sebagai pengamat. Peran peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagai partisipasi tidak aktif. Artinya, peneliti melakukan apa yang dilakukan oleh informan tetapi tidak sepenuhnya. Hal ini karena peneliti membutuhkan waktu dilapangan untuk mencatat kondisi lapangan yang dapat merekam data tanpa terlibat dengan aktivitas informan.

3.5.2. Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur terhadap informan sebagai metode pengumpulan data. Tujuan dari penggunaan metode ini memungkinkan peneliti menggali informasi dan data yang berkaitan dengan fenomena penelitian secara lebih terbuka, terstruktur, berurutan, dan mendalam. Dalam upaya pengumpulan data, peneliti menerapkan metode wawancara dengan fokus pada penelitian terkait implementasi PRODAMAS Plus di Kelurahan Kaliombo. Hasil dari data yang diperoleh disesuaikan dengan kapasitas dari masing-masing informan dan ketentuan tersebut dapat diperoleh data yang berbeda. Oleh karena itu, informan yang ada dalam wawancara lebih dari satu agar data yang dihasilkan dapat memperoleh hasil yang valid.

Peneliti akan mulai melaksanakan wawancara pada 1 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024. Pada tanggal 1 Desember 2023 peneliti akan melaksanakan wawancara dengan informan HR di kantor kelurahan Kaliombo, kemudian pada tanggal 4 Desember 2023 dan 5 Desember 2023 peneliti akan pergi ke kantor kelurahan Kaliombo untuk melaksanakan wawancara dengan informan AT dan informan RB. Pada tanggal 11 Desember 2023 dan 20 Desember peneliti akan melaksanakan wawancara di kantor kelurahan Kaliombo dengan informan DF dan informan TS. Peneliti juga akan pergi ke rumah narasumber pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2 Januari 2024 untuk mencari informasi serta data dari informan DNS, TAA, DR, dan SA.

3.5.3. Dokumentasi

Jenis dokumentasi yang dikumpulkan dalam konteks penelitian ini berhubungan dengan implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Plus. Dokumentasi yang diambil harus mampu mencerminkan fenomena atau dari data yang diperoleh dan memberikan informasi terkait lokasi penelitian, aktivitas yang sedang berlangsung. Data dokumentasi yang dibutuhkan peneliti dapat berupa menjelaskan misalnya catatan harian maupun sejarah, berbentuk gambar seperti foto ataupun sketsa maupun berbentuk karya seperti gambar, film dan lain sebagainya. Sumber-sumber dokumentasi ini mencakup

laporan-laporan sebelumnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Kediri dan Kelurahan Kaliombo yang masih relevan dengan fenomena yang sedang diteliti.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini antara lain pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penyimpulan atau verifikasi data (Miles dan Huberman, 1992 ; dalam Sugiyono 2018). Diuraikan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Data (*data collection*). Pada tahap ini, peneliti akan memulai proses analisis data dengan mengumpulkan data penelitian yang relevan melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti menggunakan alat bantu seperti perekam suara dan kamera untuk mencatat informasi yang diperoleh selama proses observasi, wawancara, dan pemeriksaan dokumen.
- b. Reduksi Data (*data reduction*). Dalam tahap ini, peneliti merangkum informasi dari yang umum menjadi yang lebih spesifik dan fokus pada aspek-aspek yang relevan dengan permasalahan penelitian.
- c. Penyajian Data (*data display*). Pada tahap ini, data yang sudah direduksi akan disajikan dalam bentuk yang lebih jelas dan terstruktur. Dalam penelitian ini penyajian data dapat mengambil bentuk table, bagan, atau grafik yang memungkinkan pembaca untuk dengan mudah memahami hubungan antara kategori-kategori yang relevan
- d. Penyimpulan atau Verifikasi Data (*conclusion drawing or verification*). Pada tahap ini, peneliti akan mengambil data yang telah disajikan dalam berbagai bentuk dan mengambil kesimpulan dari temuan yang ditemukan.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data berperan penting dalam memeriksa validitas dan reliabilitas informasi yang telah diberikan oleh informan kepada peneliti. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menerapkan metode triangulasi sumber sebagai teknik keabsahan data. Model penelitian triangulasi sumber mengarahkan peneliti untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber yang berbeda. Dengan kata lain,

data yang sama atau serupa akan diuji lebih lanjut dalam hal kebenarannya dengan mengambil informasi dari beberapa sumber data yang berbeda. Peneliti akan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber untuk memastikan konsistensi dan akurasi data, serta mengidentifikasi sejauh mana data tersebut valid.



BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Plus di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri menjadi batasan masalah yang dikaji oleh peneliti melalui hasil dan pembahasan penelitian. Secara keseluruhan bab ini memaparkan hasil penelitian yang dikumpulkan peneliti melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi di lapangan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan hasil penelitian. Sub bab hasil menyampaikan data-data penelitian berupa gambaran umum Kelurahan Kaliombo dan Profil Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Plus di Kelurahan Kaliombo. Kemudian pada sub bab pembahasan dijelaskan menggunakan pendialogan teori mengenai implementasi program dalam Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Plus di Kelurahan Kaliombo.

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Kelurahan Kaliombo

a. Kondisi Geografis Kelurahan Kaliombo

Secara administratif Kelurahan Kaliombo termasuk dalam wilayah Kecamatan Kota, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur. Kelurahan Kaliombo memiliki luas wilayah 117,00 Ha. Sebagian besar wilayahnya merupakan tanah kering menjadi kawasan pemukiman warga. Secara monografi jarak tempuh kelurahan Kaliombo ke pusat Kota Kediri adalah 0,00 Km sedangkan jarak tempuh untuk sampai ibu kota Provinsi adalah sekitar 125 Km.

Kondisi topografi wilayah kelurahan Kaliombo berada pada dataran rendah dengan curah hujan 140 mm/tahun dan suhu rata-rata mencapai 30°C yang berada pada ketinggian 67,00 mdl. Sebagaimana terlampir pada tabel 4.1, kondisi topografi seperti ini digunakan oleh masyarakat untuk pemukiman

Tabel 4. 1 Kondisi Iklim kelurahan Kaliombo

Iklim	
Curah Hujan	140,00 mm
Jumlah bulan hujan	6 bulan
Kelembapan	20,00
Suhu rata-rata harian	30°C
Tinggi tempat dari permukaan laut	67,00 mdl

Sumber: Profil Kelurahan Kaliombo 2023

b. Kondisi Demografis Kelurahan Kaliombo

Kondisi demografi atau potensi sumber daya manusia di Kelurahan Kaliombo berdasarkan data yang diperoleh dari profil Kelurahan Kaliombo tahun 2023, bahwa penduduk Kelurahan Kaliombo sebanyak 8164 jiwa, dengan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 4050 jiwa dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 4114 jiwa. Jumlah kepala keluarga (KK) di Kelurahan Kaliombo adalah sebanyak 2762 KK. Jika membandingkan antara jumlah penduduk dan jumlah KK, maka dapat dikatakan bahwa rata-rata anggota keluarga dalam satu rumah tangga adalah 3 orang.

Tabel 4. 2 Jumlah Perkembangan Penduduk Kelurahan Kaliombo

A. Jumlah Penduduk		
Jumlah	Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
Jumlah penduduk tahun ini	4050 orang	4114 orang
Jumlah penduduk tahun lalu	4019 orang	4061 orang
Persentase Perkembangan	0,67%	1.31%

Sumber: Profil Kelurahan Kaliombo 2023

Tertulis pada profil Kelurahan Kaliombo 2023, perkembangan kependudukan di Kelurahan Kaliombo dalam kurun waktu 2022-2021 meningkat 0,67% untuk laki-laki dan meningkat 1,31% untuk penduduk perempuan. Hal ini menandakan bahwa jumlah penduduk kelurahan Kaliombo semakin meningkat seperti yang tertulis di tabel. Berdasarkan jumlah penduduk tersebut, dalam catatan monografi, jumlah penduduk dengan rentang usia 0-15 tahun sebanyak 1922 orang, jumlah rentang usia 16-65 sebanyak 5741, dan jumlah penduduk usia 66 tahun keatas adalah sebanyak 483 orang. Data ini menunjukkan bahwa usia produktif penduduk kelurahan Kaliombo sangat baik. Walaupun persentase antara

laki-laki dan perempuan di Kelurahan Kaliombo lebih besar perempuan, produktivitas di Kelurahan Kaliombo tetap sejalan tidak ada diskriminasi antara gender yang menyebabkan hak dan kewajiban masyarakat tidak terpenuhi.

c. Kondisi Pendidikan di Kelurahan Kaliombo

Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dalam Monografi kelurahan Kaliombo dikatakan baik dikarenakan sebanyak 6.974 orang menempuh pendidikan. Rincian tingkat pendidikan kelurahan Kaliombo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 3Tingkat Pendidikan kelurahan Kaliombo

Tingkat pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	101 orang	87 orang
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group	254 orang	207 orang
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	818 orang	772 orang
Tamat SD/ sederajat	426 orang	554 orang
Tamat SMP/ sederajat	625 orang	607 orang
Tamat SMA/ sederajat	1290 orang	1234 orang
Jumlah Total	6.974 orang	

Sumber: Profil Kelurahan Kaliombo 2023

Dengan jumlah populasi penduduk Kelurahan Kaliombo sebanyak 8.164 jiwa, dari jumlah tersebut sebanyak 6.974 jiwa telah menempuh pendidikan hingga tingkat SMA. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan di Kelurahan Kaliombo tergolong cukup tinggi. Kondisi masyarakat kelurahan Kaliombo menurut tingkat pendidikan digunakan untuk mengetahui kuantitas daya serap dalam pengetahuan dan teknologi, sehingga memungkinkan memperoleh pekerjaan yang layak serta mencapai kesejahteraan

Sarana dan prasarana pendidikan di kelurahan Kaliombo dikatakan kurang maksimal. Berdasarkan catatan profil kelurahan Kaliombo tahun 2023, terdapat 1 PAUD milik kelurahan, 1 Taman Kanak-kanak (TK) milik swasta, 1 Sekolah Dasar (SD) milik pemerintah, 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP) milik pemerintah. Jumlah sarana prasarana pendidikan kurang memenuhi jika dibandingkan dengan jumlah usia sekolah. Prodama Plus dalam bidang pendidikan dimanfaatkan oleh kelurahan kaliombo untuk menunjang pendidikan agama yaitu pembangunan TPQ. Pembangunan TPQ ini hanya dilakukan di satu RT dalam kelurahan kaliombo yang terdiri dari 47 RT.

d. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Kelurahan Kaliombo

Masyarakat kelurahan Kaliombo hanya terdiri dari suku Jawa. Hal ini bukan berarti masyarakat kelurahan Kaliombo minim dalam hal kemajemukan budaya, kelurahan Kaliombo sangat menerima akulturasi budaya. Tingkat keagamaan di kelurahan Kaliombo cukup tinggi dan adanya tempat beragama yang cukup banyak seperti bangunan masjid, mushola dan gereja. Dengan keberagaman agama di kelurahan Kaliombo mewujudkan sikap toleransi beragama.

Tabel 4. 4 Agama/Aliran di Kelurahan Kaliombo

Agama	Laki-laki	Perempuan
Islam	3623 orang	3660 orang
Kristen	317 orang	345 orang
Katholik	89 orang	90 orang
Hindu	6 orang	2 orang
Budha	13 orang	14 orang
Konghucu	1 orang	1 orang
Kepercayaan Kepada Tuhan YME	1 orang	2 orang
Jumlah	4.050 orang	4.114 orang

Sumber: Profil Kelurahan Kaliombo 2023

e. Kondisi Ekonomi Masyarakat

Kondisi ekonomi masyarakat kelurahan Kaliombo bisa dipahami melalui ragam mata pencaharian yang dimiliki oleh penduduknya. Hal ini karena mata pencaharian setiap individu dapat mencerminkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, juga menjadi dasar bagi pengambilan keputusan terkait kebijakan ekonomi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Tabel 4. 5 Mata Pencaharian Pokok di Kelurahan Kaliombo

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Pegawai Negeri Sipil	161 orang	99 orang
Dokter Swasta	2 orang	2 orang
Bidan Swasta	0 orang	3 orang
POLRI	13 orang	3 orang
Tukang Batu	38 orang	0 orang
Pembantu Rumah Tangga	0 orang	63 orang
Karyawan Perusahaan Swasta	907 orang	549 orang
Karyawan Perusahaan Pemerintah	1 orang	3 orang
Juru masak	2 orang	2 orang
Apoteker	0 orang	3 orang

Sumber: Profil Kelurahan Kaliombo 2023

Sebagian besar penduduk kelurahan Kaliombo bermata pencaharian sebagai karyawan perusahaan swasta dengan jumlah 1.456 orang. Tingkat pekerja wiraswasta di kelurahan Kaliombo dipengaruhi oleh kondisi kelurahan Kaliombo dikelilingi oleh pabrik, seperti pabrik PT Gudang Garam TBK. Ketenagakerjaan masyarakat kelurahan Kaliombo sebagaimana terlampir dalam tabel 4.5 diklasifikasikan usia angkatan kerja dan mereka yang tidak bekerja, secara lebih lanjut akan ditulis dalam tabel 4.6 dibawah

Tabel 4. 6 Jumlah Angkatan Kerja di Kelurahan Kaliombo

Tenaga Kerja	Laki-laki	Perempuan
Penduduk usia 0-6 tahun	355 orang	294 orang
Penduduk masih sekolah 7-18 tahun	818 orang	772 orang
Penduduk usia 56 tahun ke atas	564 orang	640 orang
Angkatan Kerja	2547 orang	2605 orang
Jumlah	4284 orang	4311 orang
Total jumlah	8.595 orang	

Sumber: Profil Kelurahan Kaliombo 2023

4.1.2 Profil Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Plus di Kelurahan Kaliombo

4.1.2.1 Latar belakang Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Plus di Kelurahan Kaliombo



PRODAMAS

Gambar 4. 1 Logo Prodamas

Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Plus adalah kelanjutan dari Prodamas yang bertujuan untuk mendorong partisipasi serta peran aktif masyarakat dalam pembangunan di tingkat kelurahan, berbasis di wilayah Rukun Tetangga. Pelaksanaan Prodamas Plus dimulai sejak tahun 2021, setelah Prodamas yang sudah berjalan sejak tahun 2015. Prodamas Plus bermula dari janji politik dari pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota pada tahun 2014, yang

kemudian terpilih dan mewujudkan program bernama Prodamas. Kepemimpinan mereka menjadikan Prodamas sebagai Program utama di Kota Kediri yang mengusung konsep pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Bagian Bidang Pemerintahan, Pemerintah Kota Kediri bahwa:

“Latar belakangnya adalah mantan Walikota, pak Abu Bakar, yang ingin mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan secara bottom-up melalui program yang dikenal sebagai Prodamas. Prodamas ini dimulai sekitar tahun 2015 dengan alokasi dana sebesar 50 Juta per RT, yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap lingkungan. Namun, seiring berjalannya waktu, evaluasi dari Pemerintah Kota diperlukan untuk menyesuaikan sasaran program tersebut. Pada tahun 2-21, muncul inisiatif baru yang disebut Prodamas Plus, dengan alokasi dana per RT yang meningkat menjadi 100 Juta rupiah. Meskipun seharusnya pada tahun 2020, program tersebut tertunda karena pandemi” (informan utama AT)

Sesuai dengan hal tersebut, tidak ada spesifik latar belakang Prodamas Plus di Kelurahan Kaliombo yang berarti bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara implementasi Prodamas Plus di Kelurahan Kaliombo dengan implementasi Prodamas Plus di Kelurahan lainnya. Implementasi Prodamas Plus di Kelurahan Kaliombo dapat dipahami kurang dalam mengoptimalkan potensi lokal.

4.1.2.2 Tujuan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Plus di Kelurahan Kaliombo

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2022, dijelaskan bahwa tujuan dilaksanakannya Prodamas Plus meliputi:

- a. Memfasilitasi masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan membantu mengartikulasikan kebutuhannya;
- b. Memfasilitasi peningkatan sumberdaya manusia melalui kegiatan dibidang pendidikan, kesehatan, sosial budaya dan kepemudaan;
- c. Memfasilitasi pengembangan potensi lokal untuk penciptaan lapangan kerja, perluasan kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan sehingga mampu mewujudkan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;

- d. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan dan kepemudaan

Upaya untuk mengimplementasi Prodamas Plus di Kelurahan Kaliombo telah dilakukan, namun belum mencakup secara menyeluruh semua tujuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2022. Hal ini menandakan bahwa masih ada ruang bagi Kelurahan untuk memperluas cakupan program dan meningkatkan upaya pelaksanaan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan lebih efektif dan komprehensif.

4.1.2.3 Implementasi Kegiatan Prodamas Plus di Kelurahan Kaliombo

Kegiatan Prodamas Plus dilaksanakan dalam beberapa bidang. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam Prodamas Plus ialah pembangunan dalam bidang infrastruktur yang meliputi pembangunan drainase, dan paving jalan yang dilakukan di setiap lingkungan RT, serta Ruang Taman Hijau (RTH) di kelurahan Kaliombo. Hal tersebut sebagaimana yang diterangkan oleh RB sebagai berikut:

“Pembangunan sarana prasarana sebelumnya tidak difokuskan secara menyeluruh. Namun, sekarang RT dapat menentukan prioritas pembangunan, seperti paving, drainase untuk mengatasi genangan dan saluran sesuai kebutuhan masyarakat” (informan RB)

Pembangunan infrastuktur juga dilaksanakan dengan membangun lampu jalan dan memasang CCTV. Informan DR menerangkan bahwa pembangunan infrastruktur dilakukan dengan memasang lampu jalan. Lampu jalan merupakan fasilitas penting yang diperlukan oleh warga kelurahan Kaliombo dikarenakan masih banyak jalan yang berada di kelurahan Kaliombo belum memiliki penerangan. Selain itu mereka juga memasang CCTV sebagai fasilitas yang ditujukan guna meningkatkan keamanan masyarakat.

Kegiatan lain juga dilaksanakan dalam bidang kesehatan. Salah satunya ialah penyediaan fasilitas posyandu dan pengadaan Program Makanan Tambahan. Informan HR menerangkan sebagai berikut:

“Upaya dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dilakukan dengan menyediakan fasilitas posyandu yang mencakup peralatan kesehatan serta Program Makanan Tambahan (PMT)” (informan HR)

Selain PMT dan penambahan fasilitas posyandu, kegiatan Prodamas Plus dalam bidang kesehatan ialah bantuan pengadaan BPJS. Informan DR menerangkan sebagai berikut:

“Saat ini masyarakat sudah memiliki BPJS. Jika sebelumnya, banyak yang khawatir dengan biaya pengobatan yang mahal saat sakit, tetapi sekarang tidak lagi karena masyarakat memiliki BPJS” (informan DR)

Prodamas Plus juga dilaksanakan dalam bidang sosial budaya. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pengadaan fasilitas yang digunakan dalam kegiatan keagamaan maupun kegiatan sosial lainnya. Informan SA menerangkan sebagai berikut:

“Setiap RT punya kompor, wajan, tenda, kursi dan sound system yang dapat dipinjam untuk hajatan masyarakat. Alat-alat tersebut juga dapat digunakan ketika ada kegiatan di masyarakat seperti peringatan hari besar Islam maupun kegiatan yang lain” (informan SA)

Adapun dalam bidang pendidikan, Prodamas Plus di kelurahan Kaliombo memiliki program pemberian bantuan fasilitas sekolah. Selain itu masyarakat kelurahan Kaliombo juga membuat program English Massif guna mengembangkan kemampuan bahasa Inggris masyarakat sebagaimana yang diterangkan oleh informan RB berikut:

“Pemberian fasilitas alat sekolah dalam mendukung pendidikan masyarakat serta adanya Program English Massif tersedia di RT3 RW4 dan RT3 RW9, membantu dalam pengembangan kemampuan bahasa Inggris” (informan RB)

Informan HR juga menambahkan bahwa selain pengadaan fasilitas sekolah, Prodamas Plus juga memberikan fasilitas keagamaan. Fasilitas keagamaan tersebut berupa pembangunan TPQ, mushola dan masjid. Melalui pengadaan fasilitas keagamaan tersebut diharapkan masyarakat dapat mengembangkan kemampuan membaca dan menulis al-Qur'an.

Prodamas Plus juga memfasilitasi masyarakat dalam bidang ekonomi. Kegiatan dalam bidang ekonomi yang telah dilaksanakan ialah mengadakan pelatihan-pelatihan usaha. Selain pelatihan usaha, terdapat beberapa RT yang membentuk koperasi sebagai lembaga yang dapat memberikan pinjaman modal usaha bagi masyarakat. Informan RB menerangkan sebagai berikut:

“Adanya pelatihan pada bidang ekonomi mendukung perkembangan usaha terutama selama pandemi COVID-19 dan menunjukkan masih banyak peluang lain di lingkungan Kaliombo yang belum terdeteksi. Di bidang ekonomi, terdapat koperasi DI RW3 dan RW8, beban utang lebih ringan. Koperasi akan dipantau oleh otoritas terkait” (informan RB)

4.1.2.4 Alokasi dana Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Plus di Kelurahan Kaliombo

Sasaran pelaksanaan Prodamas Plus adalah seluruh RT di wilayah kelurahan yang ada di Kota Kediri dengan alokasi dana sebesar RP 100.000.000/RT. Adapun dana Prodamas Plus adalah untuk kegiatan bidang infrastruktur, sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, kepemudaan dengan proporsi sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Plus Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

- A. Bidang Infrastruktur sebesar 40% dan digunakan untuk pendanaan infrastruktur bersama hasil musyawarah kelurahan paling sedikit sebesar 30% dan pendanaan infrastruktur RT paling banyak 10% untuk pembangunan dan perbaikan prasarana umum;
- B. Bidang kesehatan paling banyak 40%;
- C. Bidang sosial dan budaya paling banyak 20%;
- D. Bidang ekonomi paling banyak 30%;
- E. Bidang pendidikan paling banyak 20%;
- F. Bidang kepemudaan paling banyak 10%.

Pada tahun 2023, pelaksanaan Prodamas Plus di Kelurahan Kaliombo mengarah pada pembangunan infrastruktur dengan fokus utama pada pembangunan Ruang Taman Hijau (RTH). Di tingkat RT, infrastruktur difokuskan pada pembangunan dan perbaikan saluran air guna meningkatkan sistem *drainase* dan mengurangi risiko banjir di lingkungan setempat.

Dalam aspek sosial budaya sebagian besar RT mengalokasikan anggaran untuk pengadaan CCTV sebagai upaya untuk meningkatkan keamanan wilayah, serta peningkatan penerangan jalan guna memberikan keamanan bagi warga saat

malam hari. Sementara itu, di bidang kesehatan, prioritas utama adalah pengadaan alat kesehatan, fasilitas posyandu dan peningkatan akses jaminan kesehatan melalui BPJS kesehatan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan bagi masyarakat setempat.

Dalam bidang pendidikan, dana Prodamas Plus dialokasikan untuk pengadaan peralatan sekolah yang diperlukan serta peningkatan fasilitas Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama. Meskipun demikian, tidak ada alokasi anggaran atau program yang ditujukan untuk bidang kepemudaan di Kelurahan Kaliombo pada tahun 2023.

4.1.2.5 Dampak Pelaksanaan Prodamas Plus di Kelurahan Kaliombo

Selama periode 2015 hingga 2023, implementasi Prodamas Plus di Kelurahan Kaliombo berfokus pada peningkatan infrastruktur. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa Kelurahan Kaliombo juga telah memperluas pemanfaatan Prodamas Plus dari berbagai aspek lainnya.

Melalui Prodamas Plus, setiap RT diberikan kewenangan untuk menginisiasi pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhannya sendiri, seperti perbaikan paving, pembangunan dan pembuatan saluran air serta Ruang Taman Hijau (RTH). Hasil dari pembangunan infrastruktur yang dilakukan melalui Prodamas Plus telah memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat, seperti pengurangan genangan air dan banjir di beberapa daerah. Pernyataan ini disampaikan oleh RB:

“Dulu di Bumi Asri sering mengalami genangan air atau banjir setiap kali hujan yang menyebabkan kekhawatiran bagi warga setempat. Namun, dengan adanya Prodamas Plus perbaikan saluran air di Bumi Asri telah memberikan dampak yang signifikan. Sekarang, saat hujan kejadian banjir tidak terjadi lagi...”

Pengurangan genangan air dan banjir tidak hanya meningkatkan kenyamanan hidup bagi masyarakat setempat, tetapi juga mengurangi risiko kerugian materiil. Selain itu, keberhasilan mengurangi genangan air dan banjir juga mencerminkan efektivitas dari perencanaan dan pelaksanaan Prodamas Plus.

Pada bidang sosial budaya, adanya fasilitas seperti kursi, meja, tenda dan *sound system* di setiap RT memungkinkan masyarakat untuk mengadakan berbagai kegiatan sosial dan keagamaan dengan lebih mudah, termasuk acara peringatan Hari Kemerdekaan atau pengajian. Fasilitas ini membantu mengurangi pengeluaran pribadi dan meminimalisir kesulitan logistik dalam menyelenggarakan acara. Selain itu, pengadaan CCTV dan lampu jalan disekitar RT juga membantu meningkatkan keamanan dan memberikan rasa aman dan mengurangi resiko kejahatan. Hal ini disampaikan oleh DR selaku Warga di Kelurahan Kaliombo

“Ada CCTV dan lampu jalan ini sangat membantu apalagi pada malam hari ketika tidak ada lampu jalan, pasti gelap. Selain itu, ada juga fasilitas seperti tenda, kursi, meja, alat masak, *sound system* khusus RT. Jadi, kalau ada acara atau hajatan tinggal pinjam, bisa mengurangi pengeluaran”

Penggunaan fasilitas ini tidak hanya memfasilitasi kegiatan sosial dan keagamaan tetapi juga memebantu meningkatkan kualitas hidup dan keamanan masyarakat secara keseluruhan. Ini menunjukkan pentingnya investasi dalam fasilitas publik untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan mendukung bagi seluruh warga.

Dalam bidang kesehatan, dampak yang diberikan dengan adanya Prodamas Plus adalah pemenuhan fasilitas alat kesehatan, posyandu dan pemberian jaminan kesehatan melalui BPJS, sehingga seluruh warga terdaftar dalam jaminan kesehatan. Hal ini memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan dengan lebih mudah.

Dalam bidang pendidikan, warga merasakan dampak dari pemberian alat sekolah, meskipun pengadaan alat sekolah ini hanya dilakukan sekali selama pelaksanaan Prodamas Plus. Prodamas Plus di Kelurahan Kaliombo juga mengalokasikan dana untuk kegiatan *English massive* yang diadakan di RT3 RW4 dan RT3 RW9 sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan bahasa inggris masyarakat dengan kemampuan bahasa yang lebih baik masyarakat lebih siap menghadapi tantangan dalam lingkup global. Selain *Engglis massive* terdapat pembangunan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) dan pendidikan Al-

Qur'an untuk mewujudkan generasi Qur'an yang terampil dalam membaca dan menulis Al-Qur'an. Pada bidang ekonomi, kelurahan Kaliombo memiliki koperasi dan terdapat pelatihan ekonomi meskipun kelurahan Kaliombo belum ada usaha lanjutan setelah pelatihan selesai. Terakhir, pada bidang kepemudaan belum adanya perubahan yang signifikan dikarenakan sampai saat ini belum ada kegiatan dalam pembinaan dan pelatihan yang secara khusus mengarah pada pengembangan pemuda.

4.1.2.6 Partisipasi Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Plus di Kelurahan Kaliombo

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Plus adalah proses masyarakat secara aktif berkontribusi dengan ide-ide kreatif dan inisiatifnya selama program berlangsung. Namun, keberhasilan suatu program tergantung pada tingkat partisipasi aktif masyarakat dalam proses pelaksanaannya. Seperti dalam Prodamas Plus, tujuannya adalah agar semua lapisan masyarakat, khususnya warga di setiap RT di kota Kediri turut serta aktif dalam menjalankan program tersebut. Hal ini bertujuan agar rencana yang telah disusun sesuai dengan kebutuhan yang mereka alami.

Semua warga di setiap RT di Kota Kediri memiliki kesempatana yang sama dalam menjalankan Prodamas Plus tetapi warga di setiap RT maupun kelurahan memiliki kondisi partisipasi masyarakat yang berbeda. Di kelurahan Kaliombo Partisipasi masyarakat dalam Prodamas Plus bisa dikatakan cukup rendah, hal ini disampaikan oleh DF sebagai berikut:

“Dalam beberapa wilayah, praktik gotong royong dan swadaya masyarakat kadang kurang. Ini disebabkan oleh kurangnya rasa gotong-royong di masyarakat. Terkadang, partisipasi dalam Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS)Plus juga tidak optimal. Ini terkait dengan kurangnya kontribusi swadaya dari masyarakat. dalam bahasa yang lebih lugas, bisa disimpulkan bahwa ada kecenderungan pelit.”

Penjelasan diatas menggaris bawahi kurangnya keterlibatan dan kontribusi aktif dari masyarakat dalam praktik gotong royong dan swadaya di beberapa wilayah di Kelurahan kaliombo. Prinsip gotong royong menggambarkan kerjasama masyarakat untuk kepentingan bersama, sementara swadaya

mencerminkan usaha mandiri masyarakat tanpa ketergantungan pada bantuan eksternal, keduanya penting dalam pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaan Prodamas Plus terhambat karena minimnya dukungan dan kontribusi dari masyarakat setempat.

Partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam keberhasilan Prodamas Plus, partisipasi masyarakat di Kelurahan Kaliombo dalam pelaksanaan Prodamas Plus, terutama dalam kegiatan seperti pelatihan dan rebug warga, beberapa warga memiliki semangat di awal namun kemudian kehilangan minat atau tidak konsisten dalam kehadiran serta adanya sifat kurang peduli masyarakat dalam pelaksanaan Prodamas Plus. Diperlukan adanya upaya untuk memotivasi dan mengatasi kendala yang menghambat partisipasi masyarakat agar Prodamas dapat berjalan lebih efektif dan berdampak positif bagi masyarakat.

4.1.2.7 Aktor yang terlibat dalam Memutuskan Pendapat Terhadap Penggunaan Dana Program Pemberdayaan Masyarakat

Dalam proses pengambilan keputusan mengenai penggunaan dana Prodamas Plus diperlukan sebuah forum partisipatif yang disebut rebug warga. Rebug warga ini berperan sebagai wadah untuk menampung usulan-usulan dari setiap warga dilingkungan RT, sebelum kemudian direalisasikan oleh pemerintah. Dalam proses rebug ini, terlibat dua aktor utama, yaitu masyarakat yang dipimpin oleh ketua RT dan warganya. Aktor dari pemerintah seperti Tim Pendamping, PPTK, dan Pokmas dari Kelurahan. Dari hasil rebug warga ini terbukti bahwa dalam memutuskan mengenai penggunaan dana Prodamas Plus, keputusan mutlak berasal dari usulan-usulan yang diajukan oleh masyarakat di masing-masing RT. Dengan demikian, peran pemerintah dalam hal ini hanya sebagai fasilitator dan pengarah terhadap apa yang telah diusulkan oleh masyarakat dari masing-masing RT.

4.2 Pembahasan

4.2.2 Implementasi Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Plus

Sunyoto Usman dalam Abkim (2019) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses guna memperkuat masyarakat sehingga masyarakat akan memiliki kemandirian. Masyarakat dalam proses pemberdayaan ini harus didampingi dalam menganalisis dan memecahkan masalah dan dibantu dalam menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Masyarakat dalam perkembangan proses pemberdayaan juga harus memperhatikan sumber daya yang terdapat di lingkungannya sehingga proses pemberdayaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Hamid (2018) menerangkan bahwa sebagai suatu proses berkelanjutan, kegiatan pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup kelompok sasaran sehingga mereka menjadi lebih sejahtera dan memiliki kemampuan untuk memenuhi kehidupan pokok seta pada akhirnya mencapai suatu kemandirian. Kemandirian yang dimaksud masyarakat tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup sosial, budaya, hak partisipasi dan hak politik masyarakat dalam menentukan nasibnya sendiri. Tujuan utama dari pemberdayaan adalah untuk memperkuat kekuasaan masyarakat, terutama kelompok yang secara alami kurang berdaya.

PRODAMAS Plus merupakan salah satu program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kediri. Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Plus adalah kelanjutan dari Prodamas yang bertujuan untuk mendorong partisipasi serta peran aktif masyarakat dalam pembangunan di tingkat kelurahan yang berbasis di wilayah Rukun Tetangga. Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Sunyoto Usman dalam Abkim (2019) bahwa PRODAMAS Plus merupakan salah satu program pemberdayaan dimana masyarakat diharapkan memiliki kemandirian dalam mengidentifikasi permasalahan serta mencari alternatif penyelesaian masalah itu sendiri. Masyarakat dalam lingkup Rukun Tetangga bermusyawarah dalam menentukan program pembangunan yang berfokus pada permasalahan yang terdapat dalam lingkungan mereka sendiri.

Permasalahan serta alternatif dalam bentuk kegiatan pembangunan yang telah dimusyawarahkan kemudian secara bertahap dilaksanakan berdasarkan SOP yang telah ada.

PRODAMAS Plus juga selaras dengan yang diungkapkan oleh Hamid (2018) bahwa melalui PRODAMAS Plus masyarakat dapat menentukan sendiri nasib mereka berdasarkan program-program yang telah disusun. PRODAMAS Plus juga membuat masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan yang dilakukan di daerah mereka. PRODAMAS Plus dilaksanakan dengan tujuan agar masyarakat dapat memiliki kemandirian dalam menentukan nasib mereka berdasarkan sumber daya yang telah dimiliki.

PRODAMAS Plus yang berjalan di kelurahan Kaliombo dilaksanakan melalui beberapa kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dalam berbagai bidang yakni pembangunan infrastruktur, pembangunan bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan kepemudaan. Peneliti akan menjelaskan secara terperinci implementasi kegiatan PRODAMAS Plus dalam setiap bidang sebagai berikut:

a. Bidang Infrastruktur

Suhartini (2008) menerangkan bahwa salah satu tujuan dari pemberdayaan ialah adanya peningkatan kualitas baik dalam segi fisik maupun non-fisik. Mardikanto dan Poerwoko (2012) juga menambahkan bahwa pemberdayaan salah satunya ditujukan untuk perbaikan lingkungan (*better environment*). Lingkungan yang baik menjadi indikasi bahwa masyarakat tersebut memiliki kekuatan dalam membangun lingkungan mereka. Hal itu disebabkan karena kerusakan lingkungan merupakan akibat dari kemiskinan dan pendapatan yang berkurang dari masyarakat.

Implementasi kegiatan PRODAMAS Plus sejalan dengan apa yang diterangkan oleh Suhartini (2008) dan Mardikanto & Poerwoko (2012) yakni program pemberdayaan tersebut dilakukan dalam bidang fisik. Implementasi kegiatan PRODAMAS Plus yang dilaksanakan ialah pembangunan bidang infrastruktur melalui pembangunan jalan paving, pengadaan penerangan jalan, pembangunan drainase dan pembangunan Ruang Taman Hijau.

Pembangunan dalam bidang infrastruktu juga memiliki manfaat agar masyarakat merasa nyaman dan dapat melakukan aktivitas dengan lebih baik.

b. Bidang Kesehatan

Implementasi dalam bidang kesehatan dilaksanakan dengan membantu masyarakat untuk membuat BPJS. Program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat yang kurang mampu yang memiliki masalah kesehatan. PRODAMAS Plus kelurahan Kaliombo dalam bidang ini juga mengadakan kegiatan berupa penambahan fasilitas posyandu untuk cek kesehatan masyarakat serta pemberian PMT.

c. Bidang Sosial Budaya

Pemberdayaan masyarakat juga dapat dilaksanakan melalui perbaikan modal fisik yakni sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan masyarakat (Azis, 2010). PRODAMAS Plus kelurahan Kaliombo juga dilaksanakan melalui kegiatan pengadaan fasilitas seperti tenda, peralatan memasak, kursi dan *sound system* yang dapat digunakan oleh masyarakat ketika melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial.

d. Bidang Ekonomi

Salah satu bentuk strategi yang dapat diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat ialah memperkuat potensi yang terdapat dalam masyarakat tersebut. Sunyoto Usman (2004) menerangkan bahwa upaya pokok dalam pemberdayaan masyarakat ialah meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Peningkatan tingkat perekonomian masyarakat dapat dilaksanakan dengan memberikan bantuan modal usaha, pemberian lapangan kerja, penguatan keterampilan serta perluasan pasar.

PRODAMAS Plus Kelurahan Kaliombo dalam meningkatkan perekonomian masyarakat telah melaksanakan beberapa program. Salah satu program tersebut ialah memberikan pelatihan-pelatihan yang dapat melatih keterampilan masyarakat dalam membuka lapangan usaha. Pelatihan yang dilakukan salah satunya ialah pelatihan membuat kue. PRODAMAS Plus pada bidang ekonomi di kelurahan Kaliombo juga diimplementasikan melalui

kegiatan bantuan modal usaha yakni pengadaan koperasi. Masyarakat yang ingin membuka usaha dan memiliki permasalahan dalam modal usaha dapat mengajukan pinjaman di koperasi tersebut sehingga masyarakat tidak akan kebingungan untuk membuka usaha mereka.

e. Bidang Pendidikan

Azis (2010) menerangkan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan dengan upaya perbaikan sumber daya manusia seperti perbaikan dan pengembangan sumber daya manusia. Pemberdayaan sumber daya manusia ditujukan agar terjadi perbaikan pendidikan (*better education*) (Hamid, 2018). PRODAMAS Plus telah menerapkan apa yang disampaikan oleh Azis (2010) dan Hamid (2018) yakni dengan melaksanakan kegiatan seperti pemberian bantuan fasilitas sekolah dan pembuatan program *English Massif* guna mengembangkan kemampuan bahasa Inggris masyarakat kelurahan Kaliombo. PRODAMAS Plus juga melaksanakan pembangunan TPQ, mushola dan masjid untuk memberikan pendidikan keagamaan bagi masyarakat. Melalui program-program tersebut diharapkan masyarakat kelurahan Kaliombo memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik.

4.2.3 Tahapan dan Model Pemberdayaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Plus

Mardikanto dan Soebianti (2012; dalam Hamid, 2018) menjelaskan bahwa pemberdayaan sebagai suatu rangkaian tindakan bertujuan untuk memperkuat dan mengoptimalkan kapabilitas kelompok yang kurang berdaya dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang menghadapi masalah kemiskinan. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Mardikanto dan Soebianti tersebut, pemberdayaan melalui PRODAMAS Plus merupakan suatu program pemberdayaan yang dilaksanakan secara bertahap. Adapun dalam setiap tahapan tersebut disusun dan direncanakan dengan teratur guna tercapainya tujuan pemberdayaan.

Sebuah program memiliki langkah-langkah dan sistem yang beragam, karena setiap program memiliki metode khusus untuk mencapai tujuan tertentu. Prodamas Plus disusun dan dijalankan dengan cermat, dengan tujuan agar dapat

mencakup sebanyak mungkin kebutuhan masyarakat, meningkatkan partisipasi serta memanfaatkan potensi masyarakat sebaik mungkin.

Tahapan pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Plus di kelurahan Kaliombo berpedoman kepada Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2023. Adapun tahapan-tahapan yang dilaksanakan pada proses berlangsungnya Prodamas Plus, antara lain:

1. Tahap Sosialisasi

Setiap tahun ada perubahan mengenai Peraturan Walikota terkait dengan implementasi Prodamas Plus. Oleh karena itu, penting melakukan sosialisasi agar masyarakat dapat memahami melalui pertemuan secara langsung. Hal ini disampaikan oleh RB sebagai berikut:

“Kami rutin mengadakan pertemuan di tingkat RT dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang peraturan-peraturan terbaru, terutama terkait dengan perubahan dalam Peraturan Walikota setiap tahunnya.”

Sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat mengenai perubahan-perubahan melalui pertemuan langsung memberikan kesempatan kepada pemerintah kelurahan untuk secara rinci menjelaskan tujuan, implikasi, dan manfaat dari perubahan-perubahan kepada masyarakat. Melalui pertemuan secara langsung diharapkan akan tercipta keterlibatan yang lebih aktif dari masyarakat dalam mendukung implementasi Prodamas Plus.

2. Tahap Perencanaan

Perencanaan Prodamas Plus dilakukan secara berjenjang melalui beberapa proses, antara lain:

- a. Pengusulan dari tingkat RT yang usulan-usulan ditingkatkan RT ini haruslah hasil dari rembuk bersama warga, bukan merupakan usulan pribadi atau sekelompok warga saja dan harus dibuktikan dengan adanya daftar hadir rembuk warga lengkap dengan tanda tangan warga yang hadir;

- b. Sinkronisasi usulan perencanaan tingkat RT oleh ketua RW yang bersangkutan;
 - c. Perencanaan tingkat kelurahan;
 - d. Perencanaan tingkat kecamatan; dan
 - e. Perencanaan tingkat kota.
3. Tahap Pencairan Anggaran

Setelah tahap perencanaan, penyusunan dan pengesahan APBD, kelurahan segera mengajukan permohonan pencairan anggaran Prodama Plus kepada instansi yang terkait dengan keuangan daerah. Hal ini disampaikan oleh RB sebagai berikut:

“.....SPJ itu nanti misalnya disampaikan ke ke kita juga nanti itu nanti pembelanjaan-pembelanjaan misalnya anggaran-anggaran yang di dicairkan tahap satu misalnya tahap satu misalnya sepuluh juta terus kemudian itu nanti yang bisa di SPJkan...”

Untuk memfasilitasi proses pembuatan pertanggungjawaban keuangan yang lebih efisien, serta untuk mengamankan penggunaan dana secara bertahap sesuai dengan kebutuhan, kebijakan pencairan dana dirancang dalam beberapa tahap selama satu tahun anggaran. Dengan melakukan pencairan dalam beberapa tahap memberikan kesempatan untuk mengelola penggunaan dana secara lebih rinci dan tepat waktu. Selain itu, memungkinkan pihak yang berwenang untuk lebih mudah memantau kinerja serta memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pencairan dana dalam beberapa tahap dapat memberikan kontrol yang lebih baik atas aliran dana, meminimalkan risiko kesalahan atau penyalahgunaan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan

4. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

pelaksanaan Prodama Plus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan yang telah diidentifikasi dan dirancang dalam rencana yang telah disusun. Dalam konteks pembangunan infrastruktur, pelaksanaan akan diserahkan kepada tenaga kerja yang telah berkolaborasi sebelumnya, yang memiliki

keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Selain itu, pengadaan barang akan dilakukan dengan cara membeli barang yang sesuai dengan usulan yang telah diajukan oleh masyarakat setempat, sehingga barang yang diterima sesuai dengan kebutuhan dan usulan warga. Namun, dalam pelaksanaan pelatihan sering terjadi kendala terkait partisipasi masyarakat. Hal ini disampaikan oleh TTA, sebagai berikut:

“Pelatihan seringkali mengalami peserta yang berubah-ubah, beberapa mungkin tiba-tiba absen atau ada yang mendaftar tetapi tidak hadir. Ini menjadi masalah karena termasuk dalam pertanggung jawaban...”

Pada awalnya masyarakat bersedia untuk berpartisipasi, namun seiring berjalannya waktu, ada kemungkinan terjadinya penurunan motivasi atau bahkan keengganan untuk melanjutkan kegiatan. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya minat, kesibukan atau bahkan ketidakpahaman tentang yang dapat diperoleh dari pelatihan.

5. Penyerahan Hasil Pekerjaan

Setelah menyelesaikan proses swakelola, pokmas memiliki kewajiban menyerahkan hasil swakelola dan pelaporan pelaksanaan pekerjaan kepada lurah yang bertindak sebagai kuasa pengguna anggaran sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak swakelola. Penyerahan ini merupakan tahap penting dalam siklus pelaksanaan proyek atau kegiatan yang bertujuan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana serta pemenuhan kewajiban kontrak. Penyerahan hasil pekerjaan kepada lurah juga diikuti dengan penyusunan berita acara serah terima hasil pekerjaan. Dokumentasi ini mencatat secara rinci hasil pekerjaan yang diserahkan, termasuk kondisi, jumlah, dan kualitasnya. Dengan demikian, berita acara serah terima hasil pekerjaan menjadi bukti resmi bahwa tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan telah diserahkan sepenuhnya kepada lurah sebagai kuasa pengguna anggaran.

6. Penatausahaan dan Pelaporan

Laporan hasil pelaksanaan Prodamas Plus disampaikan oleh Lurah kepada Walikota melalui Camat secara rutin setiap semester. Pelaporan hasil pelaksanaan Prodamas Plus oleh Lurah dilakukan melalui aplikasi Progressio di perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan informatika. Hal ini juga disampaikan oleh DF sebagai berikut:

“Kita harus melaporkan kemajuan secara berkala. Oleh karena itu, tersedia situs web progressio untuk pelaporan. Dengan demikian, kita dapat menggantikan pelaporan manual menggunakan tulisan dengan metode digital”

Pelaporan hasil pelaksanaan Prodamas Plus oleh Lurah tidak lagi dilakukan menggunakan metode manual, tetapi telah beralih ke metode digital yang lebih efisien. Lurah akan menggunakan aplikasi Progressio yang telah disediakan di perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang komunikasi dan informatika. Melalui aplikasi ini, Lurah dapat dengan mudah menyusun dan mengirimkan laporan secara langsung ke pihak terkait tanpa harus melalui proses manual yang memakan waktu.

Dengan menggunakan aplikasi progressio, pelaporan menjadi lebih terstruktur dan data yang tersimpan juga akan tersimpan secara digital memungkinkan akses dan analisis yang cepat dan efisien. Dengan demikian, penggunaan teknologi dalam pelaporan hasil pelaksanaan Prodamas Plus tidak hanya meningkatkan efisien proses, tetapi juga meningkatkan akurasi dan kualitas informasi yang disampaikan kepada pihak yang berwenang.

7. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi untuk pengendalian pelaksanaan Prodamas Plus dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Tim Fasilitas Prodamas Plus Kelurahan, Tim Koordinasi Prodamas Plus Kecamatan dan Tim Pengendali Prodamas Plus secara berkala.



Gambar 4. 2 Monitoring di Kelurahan Kaliombo

Monitoring kegiatan Prodamas Plus di Kelurahan Kaliombo berlangsung pada tanggal 4 Desember 2023 dengan partisipasi seluruh ketua RT dan tim pengendali dari tingkat kota. Selama acara tersebut, setiap ketua RT memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan laporan keuangan serta perkembangan pelaksanaan Prodamas Plus di wilayah masing-masing.

Pada kesempatan ini, Kelurahan Kaliombo menerima surat peringatan dari tim pengendali tingkat Kota. Hal ini disebabkan oleh adanya kekurangan terkait pengelolaan limbah sampah di sekitar Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang telah dibangun. Meskipun RTH telah berhasil dibangun, namun masih terdapat masalah yang perlu segera diatasi terkait dengan limbah sampah di sekitarnya. Dengan menerima surat peringatan ini, diharapkan Kelurahan Kaliombo dapat segera mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk memenuhi standar lingkungan yang telah ditetapkan.



Gambar 4. 3 Evaluasi Prodamas Plus di Kelurahan Kaliombo

Evaluasi di Kelurahan Kaliombo dihadiri oleh Lurah, Pokmas, dan inspektorat, bertujuan untuk meninjau perkembangan dan keberlanjutan proyek-proyek yang sedang dilaksanakan di wilayah tersebut. Dalam evaluasi tersebut, Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi fokus utama penilaian.

Dalam evaluasi, seluruh bangunan, perlengkapan, dan fasilitas di RTH di periksa secara teliti oleh pihak terkait, termasuk Pokmas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan RTH. Pokmas diminta untuk menjelaskan dengan rinci dan detail terkait proses pembangunan RTH, termasuk tahapan, anggaran yang digunakan dan kendala yang dihadapi. Dalam proses evaluasi, ditemukan beberapa kekurangan terkait keamanan di RTH, seperti pintu pagar yang menghadap ke pembatas sungai yang masih terbuka dan berpotensi berbahaya. Kondisi ini menjadi perhatian serius dalam upaya menjaga keselamatan pengunjung dan masyarakat sekitar.

Secara umum, tahapan-tahapan yang dijelaskan dalam implementasi Prodama Plus menunjukkan sebuah proses yang terstruktur dan terencana dengan baik. Proses ini dimulai dari tahapan sosialisasi hingga tahapan monitoring dan evaluasi, yang semuanya bertujuan untuk memastikan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program.

Dalam perspektif yang lebih sempit, setiap tahap memiliki perannya masing-masing dalam mencapai tujuan akhir program. Tahap sosialisasi membuka ruang bagi pemerintah kelurahan untuk menjelaskan secara rinci kepada masyarakat mengenai perubahan-perubahan. Tahap perencanaan menjadi landasan bagi pelaksanaan program dengan memastikan bahwa usulan-usulan berasal dari musyawarah bersama warga dan disinkronkan dengan rencana di tingkat lebih tinggi. Tahap pencairan anggaran memastikan pengelolaan dana yang efisien dan tepat waktu. Tahap pelaksanaan mengarahkan upaya ke lapangan untuk memenuhi kebutuhan yang telah diidentifikasi. Tahap penyerahan hasil pekerjaan menjadi bukti resmi bahwa tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan telah diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang. Tahap penatausahaan dan

pelaporan memastikan bahwa semua proses terdokumentasi dengan baik dan data tersedia secara transparan. Terakhir, tahap monitoring dan evaluasi menjadi mekanisme penting untuk mengevaluasi keberhasilan program dan memberikan rekomendasi perbaikan.

Dengan melihat langkah-langkah pelaksanaan Prodama Plus, tujuan mekanisme Prodama Plus bertujuan untuk mengubah sistem pembangunan dari *top down planning* menjadi *bottom-up planning*. Ini bertujuan untuk melibatkan semua pihak dari awal sehingga keputusan dalam perencanaan merupakan hasil dari partisipasi bersama, mendorong keterlibatan dan komitmen penuh dalam pelaksanaannya. Dalam pemerintahan, *bottom up planning* adalah proses perencanaan yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat dengan pemerintah berperan sebagai fasilitator.

Menurut Payne (dalam Hasanah,2020) dalam konsep *bottom up planning*, perencanaan didasarkan pada kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dialami oleh pihak yang lebih bawah, dengan keterlibatan dari atasan sebagai fasilitator dalam menetapkan kebijakan atau mengambil keputusan. Dalam konteks pemberdayaan, *bottom up planning* merupakan proses perencanaan yang disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat itu sendiri, sementara pemberdayaan bertindak sebagai fasilitator.

Prodama Plus merupakan suatu program yang menggunakan model pemberdayaan *bottom up planning*. Hal ini terbukti pada proses perencanaan Prodama Plus memerlukan rembuk warga, ketua RT dari setiap lingkungan RT harus mengumpulkan semua warga untuk merencanakan kebutuhan di lingkungan RT. Hasil dari rembuk warga ini kemudian direalisasikan oleh pemerintah.

Adapun tahap perencanaan dari Prodama Plus yang menerapkan sistem *bottom up planning* , adalah sebagai berikut:

1. Pengusulan dari tingkat RT yang usulan-usulan ditingkatkan RT ini haruslah hasil dari rembuk bersama warga, bukan merupakan usulan pribadi atau sekelompok warga saja dan harus dibuktikan dengan

adanya daftar hadir rembug warga lengkap dengan tanda tangan warga yang hadir;

2. Sinkronisasi usulan perencanaan tingkat RT oleh ketua RW yang bersangkutan;
3. Perencanaan tingkat kelurahan;
4. Perencanaan tingkat kecamatan; dan
5. Perencanaan tingkat kota.

Proses perencanaan yang berawal dari usulan-usulan di tingkat RT menunjukkan implementasi sistem pemberdayaan *bottom up planning*. Usulan-usulan tersebut berasal dari inisiatif masyarakat itu sendiri yang disusun melalui rembug atau musyawarah warga di setiap lingkungan.

4.2.4 Faktor-faktor Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Plus di Kelurahan Kaliombo

Proses implementasi kebijakan Prodamas Plus masih dihadapkan pada beberapa kendala yang menjadi penghambatnya. Oleh sebab itu, dianalisis penyebabnya berdasarkan teori model implementasi kebijakan George C. Edwards III dalam Abdal (2015). Model implementasi kebijakan ini memandang bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi (sikap), dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi kebijakan merupakan hal yang sangat penting. Ini juga menjadi salah satu variabel kunci yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, karena komunikasi memiliki peran yang signifikan dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implemenasi kebijakan. Implementasi yang efektif akan tercapai jika para pembuat keputusan memiliki pemahaman yang baik tentang apa yang mereka lakukan. Informasi yang diperoleh oleh para pengambil keputusan dapat diperoleh melalui komunikasi yang baik.

Edward dalam Abdal (2015) menerangkan bahwa komunikasi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi dari suatu kebijakan. Komunikasi dilaksanakan dengan adanya pemahaman yang

baik dari pihak-pihak yang terlibat dan memiliki tugas. Komunikasi yang baik dapat tercipta jika setiap pihak yang terlibat memahami masing-masing tugas mereka sehingga kebijakan tersebut akan berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuannya. Komunikasi juga diperlukan dalam hal menyampaikan informasi kepada kelompok sasaran dari kebijakan yang dilaksanakan. Informasi mengenai tujuan dan sasaran dari kebijakan tersebut harus disampaikan dengan jelas kepada kelompok sasaran agar mengurangi kemungkinan terjadinya hambatan dalam implementasi.

Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Edward dalam Abdal (2015) pihak Pemerintahan Kelurahan Kaliombo telah melaksanakan komunikasi dengan kelompok sasaran dari PRODAMAS Plus. Komunikasi dilaksanakan dengan sosialisasi yakni pertemuan langsung dengan masyarakat guna menjelaskan tujuan, implikasi dan manfaat dari PRODAMAS Plus. Pemerintah Kelurahan Kaliombo menyampaikan bagaimana PRODAMAS Plus berjalan dan apa saja peran serta tugas masyarakat didalamnya. Pertemuan langsung tersebut dilaksanakan dengan harapan masyarakat dapat memahami dengan baik peran serta tugas mereka sehingga dapat mengurangi hambatan dan menghindari adanya kesalahpahaman karena masyarakat dapat bertanya secara langsung serta mendapatkan jawabannya dengan jelas.

Edward dalam Abdal (2015) juga menerangkan bahwa terdapat tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan komunikasi yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Sejalan dengan yang diungkapkan Edward, Pemerintah Kelurahan Kaliombo telah memenuhi indikator tersebut yakni dengan langkah-langkah berikut:

(1) Transmisi

Transmisi merupakan bentuk penyaluran komunikasi yang efektif. Pemerintah Kelurahan Kaliombo melalui pertemuan langsung dalam penyampaian kegiatan PRODAMAS Plus diharapkan dapat meningkatkan keefektifan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah Kelurahan Kaliombo juga melakukan sosialisasi terkait perubahan-perubahan yang terdapat dalam PRODAMAS Plus secara langsung.

Berdasarkan pertemuan langsung tersebut, Pemerintah Kelurahan Kaliombo memiliki kesempatan untuk menjamin bahwa pesan yang disampaikan kepada masyarakat dapat ditransmisikan dengan jelas dan efektif. Pertemuan langsung dapat mencegah terjadinya miskomunikasi yang seringkali menjadi hambatan dalam pelaksanaan.

(2) Kejelasan

Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan haruslah jelas. Melalui pertemuan langsung, pemerintah kelurahan dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai tujuan, implikasi dan manfaat dari perubahan dari Perwali. Dengan demikian, masyarakat memiliki pemahaman dan menghindari kebingungan.

(3) Konsistensi

Pesan yang disampaikan harus jelas dan konsisten yakni tidak berubah-ubah ketika menyampaikan pesan tersebut. Konsistensi juga termasuk dalam terjalannya komunikasi secara terus menerus sehingga setiap progres dapat diketahui oleh pihak lain yang saling terkait dalam pelaksanaan tugasnya. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Pemerintah Kelurahan Kaliombo juga melaksanakan komunikasi dengan masyarakat dengan konsisten agar masyarakat sebagai kelompok sasaran dapat melaksanakan tugas dan peran mereka dengan baik.

b. Sumber Daya

Sumberdaya dipandang sebagai input dalam suatu organisasi yang merupakan sebuah sistem yang memiliki implikasi baik dari segi ekonomis maupun teknologis. Dari segi ekonomis, sumber daya terkait dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang mencerminkan nilai atau manfaat yang potensial ketika diubah menjadi hasil akhir. Sementara itu, dari sudut pandang teknologi, sumber daya merujuk pada kemampuan transformasi organisasi tersebut.

Pada tahun 2023, pelaksanaan Prodamas Plus di Kelurahan Kaliombo mengarah pada infrastruktur dengan fokus utama pada pembangunan RTH

serta pembangunan dan perbaikan saluran air di tingkat RT guna meningkatkan sistem *drainase* dan mengurangi risiko banjir di lingkungan setempat. Ini mencerminkan pemanfaatan sumberdaya dalam organisasi, baik dari segi ekonomis maupun teknologis. Dari segi ekonomis, sumberdaya digunakan dalam bentuk alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur, yang mencerminkan nilai dan manfaat potensinya. Dari segi teknologi, penggunaan sumber daya digunakan untuk aspek sosial budaya, kesehatan, dan pendidikan termasuk pengadaan CCTV untuk keamanan wilayah, peralatan kesehatan dan fasilitas pendidikan.

c. Disposisi

Menurut Edward III dalam Abdal (2015), kecenderungan atau disposisi merupakan salah satu faktor yang memiliki konsekuensi penting dalam implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana memiliki kecenderungan atau sikap positif serta memberikan dukungan terhadap implementasi kebijakan, maka kemungkinan besar implementasi kebijakan akan berjalan sesuai dengan keputusan. Sebaliknya, jika sikap para pelaksana cenderung negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena adanya konflik kepentingan, maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Berdasarkan wawancara bersama HR selaku Kepala Kelurahan Kaliombo menyampaikan terkait implementasi Prodamas Plus menuturkan bahwa:

“Saya tidak mau melaksanakan kampung keren secara resmi karena itu hanya sebatas formalitas pemerintahan. Tidak ada bukti nyata dimanapun kampung keren hanya menimbulkan masalah tambahan. Ini hanya menambah pekerjaan yang harus dilakukan. Program pemerintah pastinya terbatas oleh aturan dan yang kedua selalu menjadi sorotan masyarakat. orang-orang yang tidak memahaminya justru menjadi bahan tertawaan. Kepala kelurahan pun bisa menjadi pusing berat”

Melalui wawancara bersama HR selaku Kepala Kelurahan juga mengatakan:

“Sebaiknya tidak ada lagi Prodamas Plus. Pekerjaan bagi kepala kelurahan sudah cukup banyak. Prodamas Plus hanya menambah beban kerja kelurahan dan meningkatkan risiko yang harus dihadapi”

Dengan ini, HR selaku kepala kelurahan menjadi tombak utama dalam keberhasilan Prodama Plus di tingkat kelurahan kecenderungan negatif atau sikap negatif. Hal ini dikarenakan penolakan terhadap pelaksanaan program “kampung keren”, yang merupakan salah satu program dalam bidang ekonomi yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat. Pelaksanaan program tersebut dianggap hanya menambah pekerjaan yang harus dilakukan tanpa memberikan dampak positif yang signifikan. Program pemerintah, secara umum terbatas oleh aturan dan selalu menjadi sorotan masyarakat. Kepala Kelurahan Kaliombo juga mengungkapkan bahwa sebaiknya tidak ada lagi Prodama Plus. Menurutnya, pekerjaan bagi kepala kelurahan sudah cukup banyak dan program tersebut hanya menambah kerja serta meningkatkan risiko yang harus dihadapi.

d. Struktur Birokrasi

Menurut Edward III dalam Abdal (2015), struktur birokrasi memiliki dua dimensi utama. Pertama, dimensi fragmentasi yang mengacu pada penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda, sehingga memerlukan koordinasi antar badan tersebut. Kedua, dimensi Standar Prosedur Operasional (SOP), yang bertujuan untuk memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian, struktur birokrasi harus mampu mengelola fragmentasi tanggung jawab dan menyediakan SOP yang jelas untuk memastikan efektivitas dan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan

1. Standar Prosedur Operasional (SOP)

Standar Prosedur Operasional (SOP) merupakan hasil dari kebutuhan internal untuk memastikan ketepatan waktu, pengelolaan sumber daya, dan konsistensi dalam tindakan di lingkungan kerja yang kompleks dan luas. SOP sering digunakan untuk mengatasi situasi umum di berbagai sektor, baik di sektor publik maupun swasta. Meskipun dalam implementasi kebijakan, SOP dapat menjadi kendala maupun memiliki manfaat. HR menyatakan:

“Pelaksanaan dimulai dengan rembuk warga tingkat RT dan RW, dimana usulan-usulan dari warga tentang berbagai kebutuhan mereka ditampung. Kemudian, usulan-usulan tersebut diverifikasi

oleh lurah untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku, termasuk yang masuk dalam kategori bantuan sosial yang diatur dalam BDT atau DTS. Setelah itu kelurahan menetapkan prioritas usulan yang akan disetujui sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia”

Dari hasil wawancara, menjelaskan bahwa SOP yang digunakan di kelurahan Kaliombo sesuai dengan yaitu Peraturan WaliKota Kediri Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Plus Tahun anggaran 2023.

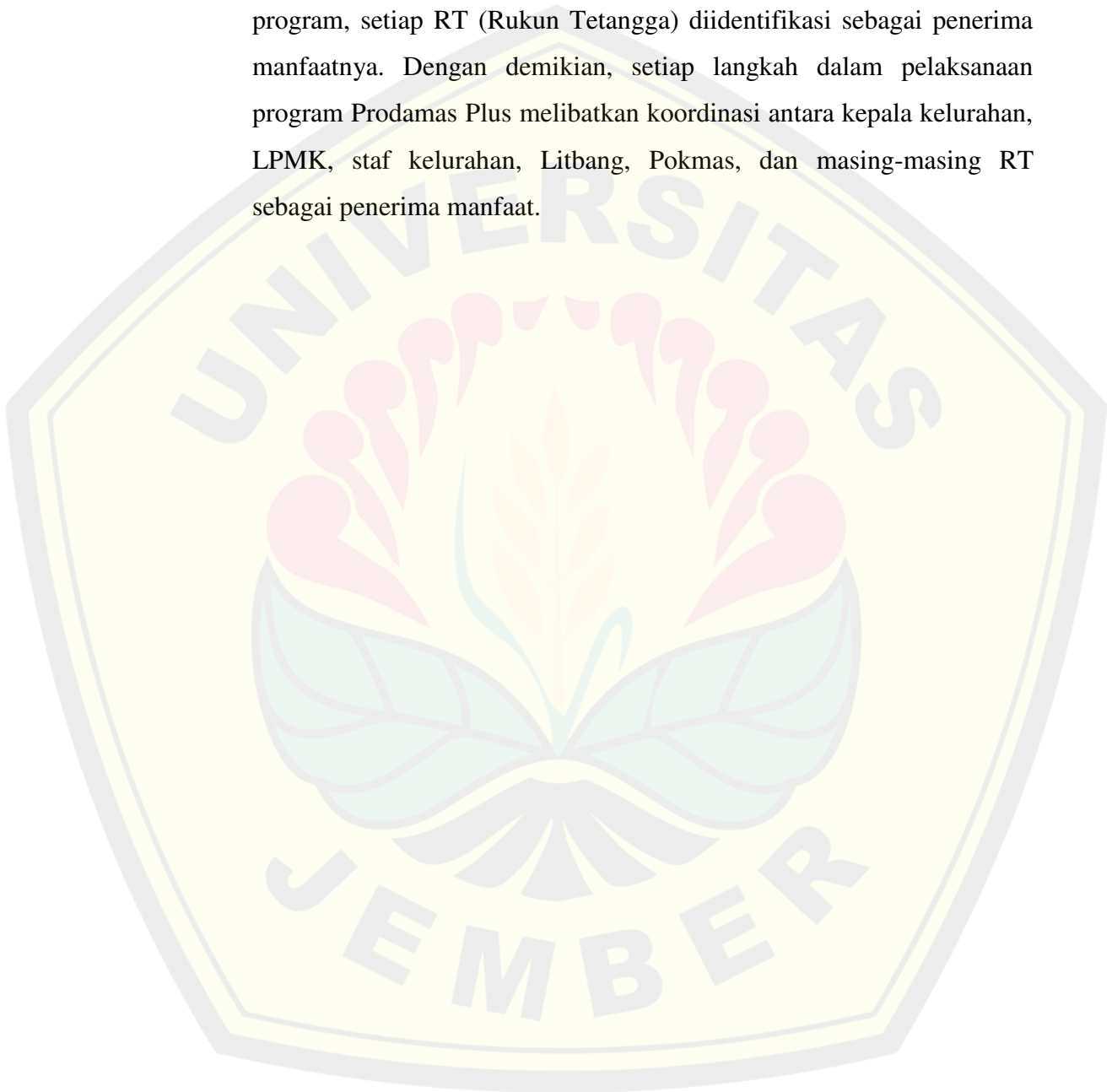
2. Fragmentasi

Fragmentasi adalah salah satu karakteristik dari variabel birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan. Fragmentasi mengacu pada penyebaran tanggungjawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda, sehingga memerlukan koordinasi yang lebih besar. AT selaku Kepala Bidang Pemerintahan menjelaskan:

“Implementasi program memerlukan kerjasama antara RT dan Pokmas, yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengendalian, dan pengawasan. Penting untuk menyusun pertanggung jawaban dan melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan kelancaran pelaksanaan. Monitoring dan evaluasi merupakan bagian penting dari pengendalian untuk mengidentifikasi kesulitan yang mungkin timbul dan mencari solusinya. Rapat di tingkat kota juga penting untuk mengevaluasi masalah yang muncul dalam mekanisme pengadaan barang dan pemenuhan kebutuhan.”

Dalam pelaksanaan Prodamas Plus, langkah pertama yang diambil adalah oleh kepala kelurahan. Kepala kelurahan bertanggung jawab untuk memulai proses tersebut. Selanjutnya, sebuah tim fasilitasi dibentuk yang melibatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). LPMK berperan sebagai lembaga yang membantu kelurahan sebagai jembatan untuk masyarakat dalam program tersebut. Setelah melibatkan LPMK, tim fasilitasi ini kemudian melibatkan sekretaris kelurahan serta staf kelurahan lainnya. Selanjutnya, dari bagian litbang, Kepala Bagian Litbang dan Pengembangan Kelurahan (Litbang) ikut serta dalam proses ini. Litbang bertanggung jawab terkait

koordinasi terkait dengan aspek ekonomi dan pembangunan. Setelah semua persiapan dan koordinasi dilakukan, pelaksanaan program dilakukan oleh Pokmas (Kelompok Masyarakat). Pokmas merupakan lembaga yang bertugas untuk melakukan pelaksanaan program sesuai dengan rencana yang telah disusun. Terkait dengan penerima manfaat program, setiap RT (Rukun Tetangga) diidentifikasi sebagai penerima manfaatnya. Dengan demikian, setiap langkah dalam pelaksanaan program Prodamas Plus melibatkan koordinasi antara kepala kelurahan, LPMK, staf kelurahan, Litbang, Pokmas, dan masing-masing RT sebagai penerima manfaat.



BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan tentang implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS)Plus di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri sebagai berikut:

1. Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS)Plus di kelurahan Kaliombo secara alur pelaksanaan sudah berjalan secara sistematis. Realisasi dana Prodamas Plus masih berfokus pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur serta pengadaan barang dalam bidang sosial.
2. Partisipasi masyarakat di kelurahan Kaliombo dapat dikatakan kurang aktif dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Plus. Kurangnya pemahaman atau kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Prodamas Plus terutama pada program pelatihan serta kepemudaan.
3. Model pemberdayaan pada implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Plus merupakan model pemberdayaan *Bottom up planning* dikarenakan proses perencanaan yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat dengan pemerintah berperan sebagai fasilitator
4. Pemerintah Kelurahan Kaliombo menolak beberapa program dari Prodamas Plus karena dianggap hanya formalitas dalam pemerintahan. Dinilai hanya menimbulkan masalah dan menambah beban kerja tanpa memberikan manfaat yang signifikan. Meskipun ada keraguan terhadap Prodamas Plus yang menambah pekerjaan dan risiko bagi kelurahan, namun tetap mendukung dan melaksanakan Prodamas Plus.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan yang diperoleh dari fenomena di lapangan, perlu adanya peningkatan serta perbaikan-perbaikan yang terangkum dalam beberapa saran, diantaranya:

1. Memberikan sosialisasi yang lebih intensif kepada seluruh lapisan masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat memahami esensi dari Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Plus. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang program ini, diharapkan partisipasi masyarakat akan meningkat, sehingga tujuan program dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.
2. Pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pemanfaatan Prodamas Plus secara maksimal, agar pemberdayaan berkelanjutan dapat terimplementasi

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan

Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat

Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Plus

Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Plus Tahun anggaran 2023

BUKU:

Abdal, A. (2015). Kebijakan publik: Memahami konsep kebijakan publik. Bandung

Adi, I. R. (2013). Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial. *Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan, Jakarta: Rajawali Pers.*

Abdullah, Muhammad Syukur, 1988. *Perkembangan Studi Implementasi*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia.

Azis, I J. (2010). Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim. *Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.*

Creswell, J. W. (2019). Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed. *Yogyakarta: pustaka pelajar.*

Edi, S. (2008). Kebijakan sosial sebagai kebijakan publik. *Bandung: Alfabeta.*

Edi, S. (2009). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial, Rafika Aditama.

Hamid, H. (2018). Manajemen pemberdayaan masyarakat, *Makassar: De La Macca*

Mardikanto, T. Dan Poerwoko. (2012). Pemberdayaan Masyarakat. *Bandung: Alfabeta.*

Sugiyono. (2018), Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. *CV. Bandung: Alfabeta*

Suhartini. (2008). Model-model Pemberdayaan Masyarakat. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar.*

Usman, Sunyoto. (2004). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.*

JURNAL:

Pinayungan, A. (2023). *Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) Bantuan Dana 50 Juta Tiap Rt Di Kelurahan Jamsaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri* (Doctoral dissertation, IPDN).

Tamrin, M. H., Fatimah, S. S. N., & Wahyuni, S. (2022). Community Participation in The Successful Community Empowerment Program (Prodamas) In Ngronggo Village Kediri City. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 10(1), 1-7.

Yulistya, G. I., & Rahaju, T. (2023). *Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) Plus Pada Bidang Ekonomi Di Kelurahan Bangsal Kota Kediri (Studi Pada Koperasi Sehat Sejahtera Erwe 2 Bangsal)*. *Publika*, 1697-1710.

SKRIPSI:

Abkim, Idvit Iganuzeprori. (2019). *Analisis Program Pemberdayaan Ekonomi Petani dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Kelompok Tani Pekon Banjar Agung Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus)*. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung.

Hasanah, D. R. N. (2020). *Analisis Model Pemberdayaan Masyarakat Pada Warga Tunagrahita Di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo)

Website

Tim redaksi (31 Desember 2021). *Sepanjang Tahun 2021, Kota Kediri Raih Banyak Prestasi*. Diakses pada tanggal 23 September 2023.

<https://www.kedirikota.go.id/p/berita/10110464/sepanjang-tahun-2021-kota-kediri-raih-banyak-prestasi#:~:text=Pada%20smart%20city%2C%20Kota%20Kediri,kategori%20kota%20dengan%20masyarakat%20cerdas.>

Tim redaksi (20 Juli 2022). *Capaian UHC Kota Kediri 97,72 persen, Wali Kota Kediri Terima Penghargaan dari BPJS Provinsi Jawa Timur*. Diakses pada tanggal 23 September 2023.

<https://www.kedirikota.go.id/p/berita/10110925/capaian-uhc-kota-kediri-9772-persen-wali-kota-kediri-terima-penghargaan-dari-bpjs-provinsi-jawa-timur>

Tim redaksi (26 Januari 2023). *Evaluasi Tingkat Perkembangann Kelurahan, Pemkot Kediri Laksanakan Sosialisasi EPKel*. Diakses pada tanggal 25 Maret 2023.

<https://www.kedirikota.go.id/p/berita/10111401/evaluasi-tingkat-perkembangan-kelurahan-pemkot-kediri-laksanakan-sosialisasi-epkel>



LAMPIRAN

Dapat diakses melalui link di bawah ini:

https://drive.google.com/drive/folders/11yaU5ea2EK1S05sHiICPBaWoKM7ApRVJ?usp=drive_link

Dapat diakses melalui scan QR Code di bawah ini:

